

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM KOTA MEDAN**

(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)

SKRIPSI

OLEH:

INDAH TRI MADYATI HRP

198520073



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM KOTA MEDAN
(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

INDAH TRI MADYATI HRP

198520073

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi
Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas
Perhubungan Kota Medan)

Nama : Indah Tri Madyati Hrp

NPM : 198520073

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DISETUJUI OLEH:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.POL

Mengetahui:

Dekan Fakultas I

Ka. Prodi Administrasi Publik



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.POL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 4 Juli 2023



Indah Tri Madyati Hrp

198520073

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Tri Madyati Hrp

NPM : 198520073

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 4 juli 2023

Yang menyatakan



(Indah Tri Madyati Hrp)

ABSTRAK

Implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Medan) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang retribusi daerah di Bidang Perhubungan. Sudah ditetapkannya tarif parkir ditepi jalan umum tidak membuat juru parkir liar menjadi jerah akan tetapi masih tetap ada di beberapa titik kota Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan dan apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dianalisa menggunakan teori Merilee S. Grindle yang memiliki dua indikator yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implemantation*). Berdasarkan penelitian dengan analisis teori Merilee S. Grindle belum memenuhi indikator-indikator keberhasilan, maka dapat dikatakan bahwa penerapan implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum kota Medan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih banyak ditemukan parkir liar, dan juru parkir yang tidak menggunakan perlengkapan saat bertugas.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi, Parkir Di Tepi Jalan Umum

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the parking fee policy on the side of the Medan city public road and to find out the inhibiting factors for implementing the policy. This research uses qualitative methods and uses the theory of Merilee S Grindle which has two indicators, namely the content of the policy and the context of implementation. the results of this study have not gone well because there are still illegal parking, and illegal parking attendants in the city of Medan. Keywords: Implementation, Policy, parking fees on public roads

Keywords: Implementation, Retribution, Parking on Public Roads



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Indah Tri Madyati Hrp, anak dari Bapak Raja Abdul Halim Harahap, SH dan Ibu Kartni, Am.Keb. Lahir di Saentis pada 18 September 2001. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara.

Penulis bersekolah di Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlash di Saentis pada tahun 2006, melanjutkan bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 101777 di Saentis pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Percut Sei Tuan, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan Sekolah di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis melanjutkan Studi Strata Satu (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis mengikuti Program Merdeka yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur selama 5 bulan dari Agustus 2022 sampai Desember 2022.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia serta kekuatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini adalah syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, Tuhan turut bekerja dalam menolong setiap proses penelitian skripsi ini. Melalui pihak-pihak yang membantu peneliti hingga terselesainya skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.POL selaku Ka. Prodi Administrasi Publik dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Hikmawan Syahputra,S.IP, MA selaku sekretaris pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi serta memberikan perkembangan informasi mengenai jadwal dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas selama dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Bapak Iswar, S.SiT, MT, Ibu Imelda Herlina, SH, M.Si selaku kepala Sub bagian umum, Bapak Nikmal Fauzi Lubis, ST selaku kepala bidang perparkiran, dan Bapak Mhd. Zein Lubis, ST selaku inspektur Sub Perparkiran. Penulis ucapkan terimakasih karena sudah membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Raja Abdul Halim Harahap, SH dan Ibu Kartini, Am.Keb yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan semua proses dalam menempuh Pendidikan dan kehidupan.
10. Kepada kakak kandung saya yaitu Henni Nurjannah Harahap, S.KM, S.Keb dan abang kandung saya yaitu Reza Abdillah Harahap, ST. terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
11. Terimakasih kepada mba Ineke Junita LumbanTobing yang selalu mengingatkan penulis dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada teman-teman selama perkuliahan berlangsung yaitu Siti Agustina Sari, Putri Yuliana, Mian Arta Ida Saragi, Ratih Putri, Eva Novianti Muham, Chintia Marsaulina Haloho dan Dewi Sri Huwaidah yang selalu mengingatkan penulis mengenai skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat saya Alike Larasati, Yolanda Kitty Sastria, Diah Endang Rizki, Atika Maharani, Sabrina, Syahraini Putri, Amanda Putri Ramadhani Tambak dan Widi Ahyartianingsih yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya mahasiswa Administrasi Publik A1 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Medan, 4 Juli 2023

Penulis



Indah Tri Madyati Hrp

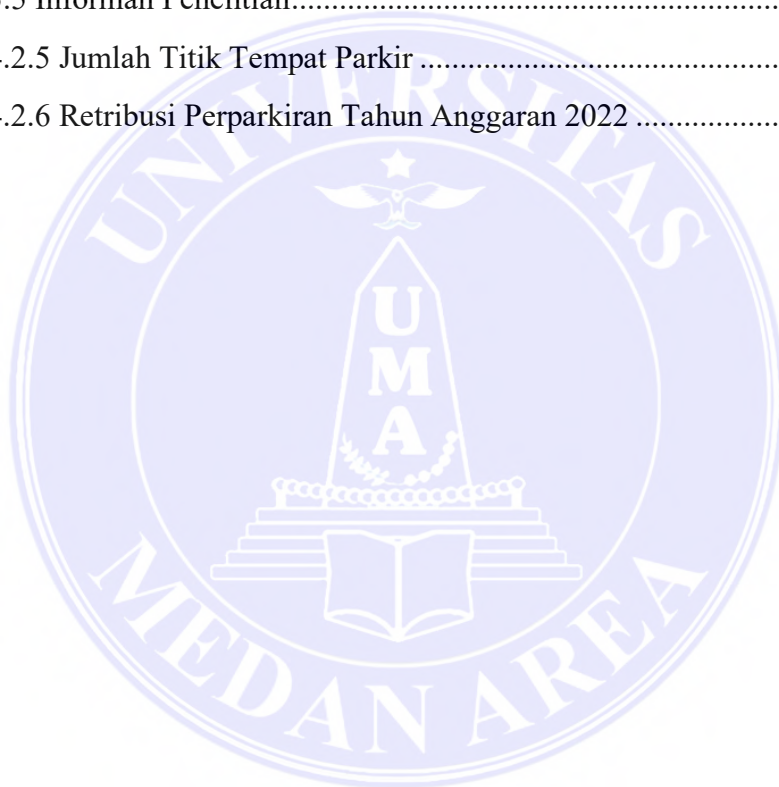
DAFTAR ISI

	HAL
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kebijakan Publik	8
2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan	11
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Model Merille S. Grindle	12
2.3 Otonomi Daerah.....	15
2.3.1 Tujuan Otonomi Daerah.....	16
2.3.2 Sasaran Otonomi Daerah.....	17
2.3.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah.....	18
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.4.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20
2.5 Retribusi Parkir.....	21
2.5.1 Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	22
2.5.2 Subjek dan Objek Retribusi Parkir.....	23
2.6 Parkir.....	24
2.6.1 Kebutuhan Parkir	25
2.6.2 Jenis-Jenis Parkir.....	27
2.6.3 Pengendalian Parkir	28
2.7 Kerangka Berpikir	30
2.8 Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Waktu Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data	39
3.5 Informan Penelitian	39

3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Kota Medan.....	44
4.1.1 Letak Geografis Kota Medan.....	45
4.2 Dinas Perhubungan Kota Medan.....	46
4.2.1 Visi dan Misi Dinas perhubungan Kota Medan.....	46
4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Medan	46
4.2.3 Struktur Dinas perhubungan Kota Medan.....	48
4.2.4 Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Medan.....	49
4.2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perparkiran Kota Medan ...	50
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
4.3.1 Isi Kebijakan (<i>content of policy</i>).....	50
4.3.2 Konteks Implementasi (<i>context of implementation</i>)	62
4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan.....	67
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Medan pada Tahun 2018-2020	4
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.3 Waktu Penelitian	37
Tabel 3.5 Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.2.5 Jumlah Titik Tempat Parkir	49
Tabel 4.2.6 Retribusi Perparkiran Tahun Anggaran 2022	50



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.2.1 Model Pendekatan Grindle.....	14
Gambar 2.7 Kerangka Berpikir Penelitian	31
Gambar 4.1 Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	77
Lampiran 2 lokasi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Medan	81
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	103
Lampiran 4 Surat Pengantar Riset Fakultas	107
Lampiran 5 Surat Pengantar Riset Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) ..	108
Lampiran 6 Surat Selesai Riset Dinas Perhubungan.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya terdapat berbagai macam suku dan budaya. Dengan wilayah yang sedemikian luas dan diikuti jumlah penduduk yang besar, tentu sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatur masyarakatnya yang menyebar di berbagai wilayah. Maka dari itu disaat pemerintahan orde baru dimulai, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralistik yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

Seiring dengan perkembangan zaman sistem sentralistik yang dulu diterapkan di Indonesia telah memunculkan berbagai masalah, seperti: peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua daerah di Indonesia yang membuat tidak sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya. Sehingga dalam menangani setiap permasalahan pemerintah tidak dapat secara cepat dan tepat, pemerintah juga dinilai kurang bisa tanggap dan cepat didalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rumah tangga suatu daerah.

Melihat berbagai masalah tersebut, dengan didasarkan atas ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, dan ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pemerintah saat ini telah memberikan otonomi kepada daerah dan hal itu dituangkan dalam UU No.32/2004 tentang pemerintahan

daerah dan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah merupakan wewenang suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri. Daerah otonom memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerahnya guna memberikan pelayanan atau memperbaiki pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Otonomi daerah akan berjalan dengan baik jika memiliki dukungan dari masyarakat seperti pemungutan dengan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kaitannya dengan otonomi daerah, maka salah satu tantangan utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Medan adalah bagaimana memahami semua potensi yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan berbagai potensi yang ada sebagai landasan berpijaknya. Maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah mengoptimalkan potensi daerah pada sektor perparkiran yang dinilai cukup signifikan didalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Afandi, 2022)

Peraturan daerah kota Medan Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan. Retribusi di Bidang Perhubungan peraturan daerah digolongkan dalam:

- a. Retribusi jasa umum terdiri dari:
 1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

- b. Retribusi jasa usaha terdiri dari:
 - 1. Retribusi terminal.
 - 2. Retribusi tempat khusus parkir.
- c. Retribusi perizinan tertentu, retribusi izin trayek.

Dinas Perhubungan mengelola tempat parkir umum sebagai fasilitas umum untuk parkir dan dikoordinasikan oleh seseorang yang sudah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan melakukan kontrak kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Parkir Pelayanan di Bidang Perhubungan yang mengatur besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Medan yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis Kendaraan	Tarif Lokasi parkir (kelas I)	Tarif lokasi parkir (kelas II)
Truk dengan Gandengan	Rp. 10.000	Rp. 5.000
Truk, Bus, Ala besar/berat	Rp. 6.000	Rp. 4.000
Truk mini	Rp. 5.000	Rp. 3.000
Pick up, Mobil Penumpang, Mini bus	Rp. 3.000	Rp. 2.000
Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 2.000	Rp. 1.000

Sumber: Peraturan Daerah kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

Fakta yang terjadi dilapangan masih ada juru parkir yang meminta tidak sesuai dengan tarif parkir yang sudah ditetapkan. Seperti dilansir oleh detikSumut pada 13 Oktober 2022 juru parkir yang berada di samping *Grand City Hall* (Aston) tepatnya di seberang *Merdeka Walk*, juru parkir meminta dengan tarif Rp5.000 permobil. Jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tarif

parkir permobil hanya Rp3.000. Juru parkir seorang perempuan yang bernama Marlina Sihotang mengatakan memiliki setoran. (Aldi, Oktober 13, 2022)

Berdasarkan tabel diatas tarif parkir yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan. Bahwa kendaraan roda dua untuk kelas I akan dikenakan biaya Rp2.000 sedangkan untuk kelas II dikenakan biaya Rp1.000, begitu juga dengan kendaraan pribadi roda empat (mobil) kelas I sebesar Rp3.000 dan kelas II sebesar Rp2.000. Kemacatan lalu lintas saat ini disebabkan karena semakin padatnya kendaraan di Kota Medan sehingga akan memerlukan tempat parkir yang lebih banyak sesuai dengan debit tampung tempat parkir di Kota Medan saat ini. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2018-2020 dikota medan.

Tabel 1.2

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Medan pada Tahun 2018-2020

Jenis Kendaraan	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	13.361	20.831	42.397
Mobil Bus	421	435	879
Mobil Barang	5.489	7.363	12.474
Sepeda Motor	151.372	177.495	232.529
Jumlah	170.325	206.124	298.287

Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dari tahun 2018-2020 terjadi peningkatan dalam jumlah kendaraan di Kota Medan. Jumlah peningkatan yang signifikan setiap tahunnya pada kendaraan sepeda motor dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Dari peningkatan kendaraan setiap tahunnya dapat dilihat banyaknya tempat parkir yang diperlukan guna menampung kendaraan berhenti di Kota Medan. Dengan peningkatan jumlah kendaraan dapat menjadi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada retribusi parkir.

Sektor perparkiran merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk digali pemerintah daerah dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya kendaraan setiap tahun, karena banyak kendaraan dari luar Kota Medan yang masuk ke Kota Medan, menyebabkan betapa pentingnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur sektor perparkiran. Jika satu kawasan tidak menyediakan lahan parkir, tentu akan terjadi kesemrawutan karena orang-orang akan memarkirkan kendaraan mereka dengan seenaknya, bahkan mungkin juga dijalan, yang nantinya akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Suatu kenyataan bahwa kendaraan tidak selalu bergerak pada suatu saat pasti akan berhenti. Maka, kendaraan yang berhenti dalam waktu sesaat akan membutuhkan lahan untuk tempat parkir. Kemudian keberadaan lahan yang khususnya di perkotaan sangat terbatas.

Saat ini Pemerintahan Kota Medan khususnya Walikota dan Dinas Perhubungan sedang menerapkan *E-Parking*. *E-Parking* merupakan pembayaran parkir dengan metode online. Akan tetapi, dengan diterapkannya metode pembayaran online Dinas Perhubungan tetap menyediakan juru parkir untuk menertibkan kendaraan bermotor yang ingin parkir.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat Judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan”** Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Medan yang berada di jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan?
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berbentuk karya ilmiah dan menjadi perbandingan penelitian selanjutnya untuk Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area.

2. Secara Teoristis

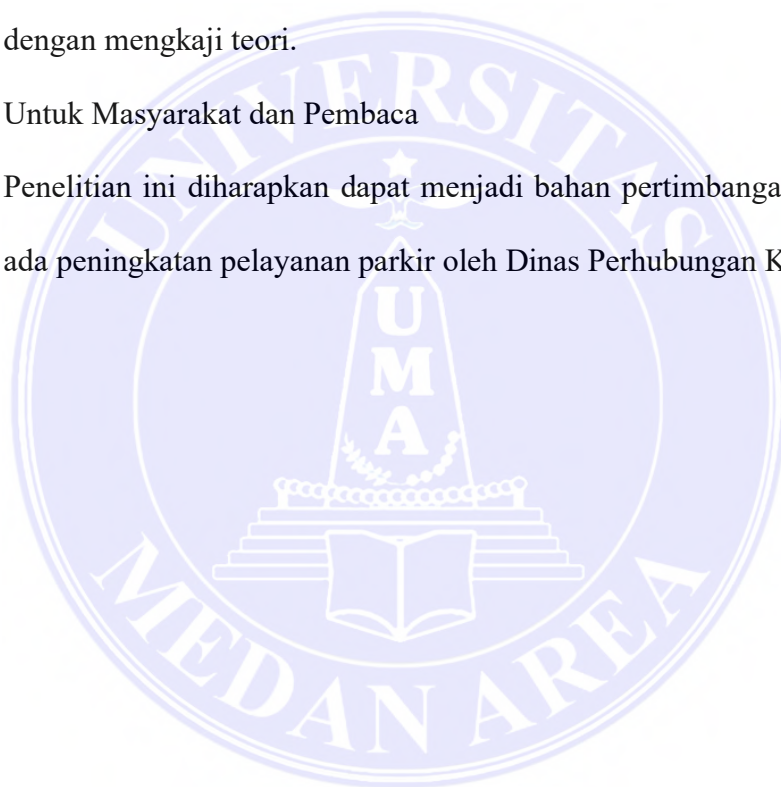
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Peraturan Daerah ataupun Undang-Undang yang berlaku.

3. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam berfikir secara ilmiah dan kemampuan menuliskan secara ilmiah dengan mengkaji teori.

4. Untuk Masyarakat dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan karena akan ada peningkatan pelayanan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Berdasarkan praktik administrasi publik sehari-hari dan memiliki kaitannya dengan hubungan antara negara dan rakyat, nampaknya dimensi ketertiban umum telah terabaikan dari perhatian publik. Harus dipahami bahwa hakekat keberadaan negara adalah ketertiban umum. Kebijakan publik adalah bentuk aktual atau konkrit dari proses dimana negara bersatu dengan rakyatnya. Kebijakan publik juga dapat dikatakan peraturan yang dibuat untuk kepentingan rakyat.

Carl Friedrich (1969) dalam Agustino (2019) yang mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat kesulitan-kesulitan (hambatan-hambatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan sebagian dari kegiatan, Friedrich menambah ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud adalah bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam kegiatan suatu masalah.

James Anderson (1984) dalam Nuryanti Mustari (2015) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya “*public policy making*” sebagai berikut, serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang perlu diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud, dan hal ini yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

David Easton (1965) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan dengan adanya definisi-definisi diatas menurut para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya kebijakan publik ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku.

2. Kebijakan publik mengandung pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah.
4. Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif.

2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa pakar politik yang tertarik mempelajari kebijakan publik dalam proses penyusunan kebijakan publik membaginya menjadi beberapa tahapan. Adapun beberapa tahapan ketertiban umum dalam Abdoellah (2016) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda.

Pada tahap ini penyusunan agenda merupakan suatu proses yang memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan memaknai apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

2. Formulasi Kebijakan.

Pada tahap ini masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas secara lebih lanjut oleh para pembuat kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang akan berjalan atau berlangsung di suatu negara atau daerah.

3. Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini memiliki tujuan secara legitimitasi untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.

4. Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini yang dilakukan pemerintah yaitu menentukan dan menetapkan kebijakan publik dan ditahapan ini sebagai langkah penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat.

5. Evaluasi Kebijakan.

Pada tahap ini yaitu dilakukannya penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dari penerapan kebijakan publik tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi secara singkat dinyatakan sebagai “aplikasi” (pelaksanaan) berarti menyediakan sarana untuk pelaksanaan untuk memberikan efek praktis, menghadirkan sarana yang diperlukan untuk mencapai sesuatu, mempengaruhi atau menghasilkan sesuatu. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah perumusan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan tanpa implementasi tidak ada gunanya, oleh karena itu politik diruang publik memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Subarsono (2011) mengemukakan bahwa implelementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan melalui penggunaan sarana (*tools*) untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Implementasi yang memiliki arti sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian atau aktivitas

suatu kebijakan untuk mencapai kebijakan yang sudah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam merealisasikan suatu kebijakan yang sudah dibuat.

Cleaves (Waluyo,2007) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik. Kemudian menurut Wibawa (Tahir,2014) tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan politik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

2.2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Model Merille S. Grindle

Proses implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan perilaku pengurus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan berkomunikasi dengan kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Pelaksanaan dari program, perilaku semua pihak dan yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan politik baik negatif maupun positif.

Keberhasilan untuk mempelajari implementasi kebijakan publik dengan lebih baik, perlu diketahui variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, model kebijakan diperlukan untuk mempermudah pemahaman konsep implementasi kebijakan. Banyak model yang dapat digunakan untuk

menganalisis implementasi kebijakan. Akan tetapi, peneliti memilih model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Adapun variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Wibawa (dalam Samodra Wibawa, 1994) mengemukakan model Grindle (1980) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka selanjutnya implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakam tersebut mencakup hal-hal berikut:

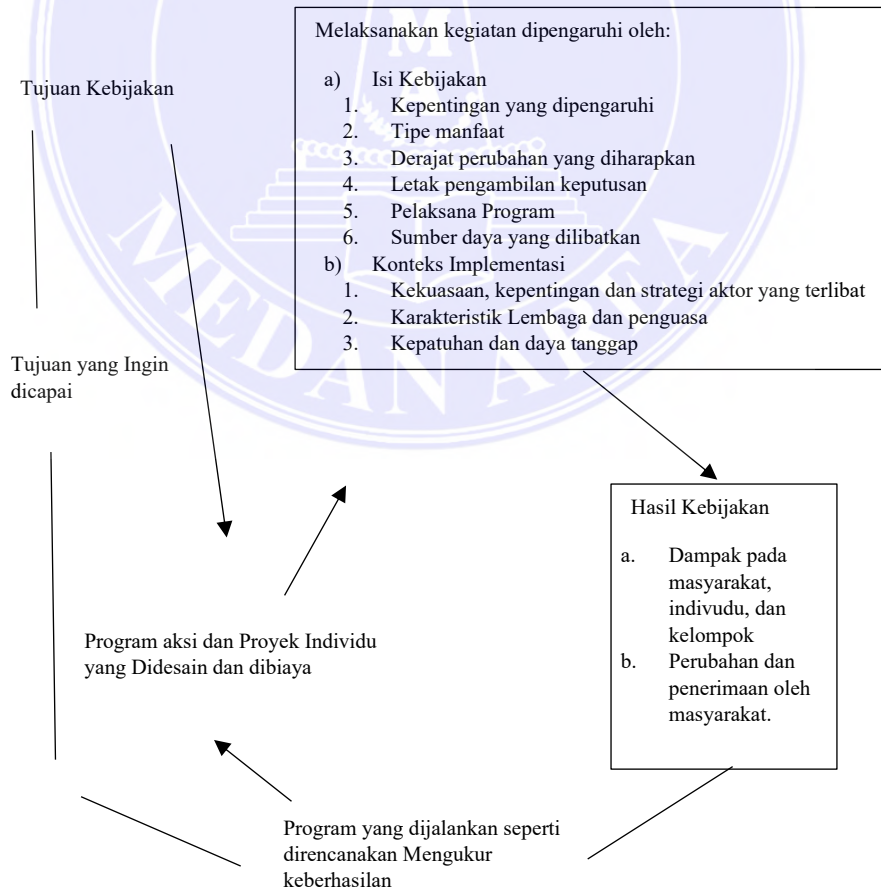
- a) Kepentingan yang dipengaruhi.
- b) Tipe manfaat.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Letak pengambilan keputusan.
- e) Pelaksanaan program.
- f) Sumber daya yang dilibatkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah sebagai berikut:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle (1980) terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi. (Kadji, Yulianto, 2015)

Gambar 2.2.1 Model Pendekatan Grindle



Sumber: Merilee S. Grindle. 1980 (Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik).

2.3 Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia mengarah pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan pemerintah daerah ini adalah untuk mengembangkan daerah dan muatan internalnya. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah ini memungkinkan berkembangnya suatu daerah dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah: “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, adalah: “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. (Fauzi, 2019).

Otonomi daerah merupakan wewenang atau kebebasan untuk daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Seperti contohnya dalam menentukan atau membuat suatu kebijakan. Karena kebijakan di setiap daerah pastinya berbeda-beda, maka pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dengan tetap dilandaskan oleh peraturan yang sudah ditetapkan.

2.3.1 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mengembangkan kehidupan masyarakat berdasarkan demokrasi, untuk mewujudkan keadilan sosial pada semua lapisan masyarakat, untuk pemerataan wilayah, untuk menjaga hubungan yang harmonis dan baik, untuk membangun hubungan baik antar daerah, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, untuk mempromosikan inisiatif dan kreativitas masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Daulay, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Adapun beberapa tujuan otonomi daerah yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan umum.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal dan optimal. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang ada di daerah dan masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan adanya pelayanan pemerintah yang baik, ramah, tanggap dan cepat di suatu daerah.

3. Meningkatkan daya saing daerah

Menggali potensi terbaik daerah untuk menampakkan atau menunjukkan keanekaragaman dan keunikan dari daerahnya sendiri.

2.3.2 Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran otonomi daerah adalah hasil yang ingin dicapai dari daerah karena sudah diberikan hak, wewenang untuk mengurus daerah atau rumah tangganya sendiri. Karena jika daerah tersebut sudah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri maka pemerintah pusat sudah yakin bahwa daerah itu dapat berdiri dengan sendiri dan lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan daerahnya sendiri.

Sasaran otonomi daerah menurut Anggoro, dkk (2017) adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga daerah tingkat II dapat mengendalikan dan memberikan pelayanan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menerima atau mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena daerah tingkat II sudah diberikan wewenang atas daerah otonomnya sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri. Maka dengan itu, daerah otonom dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerah nya sendiri dengan baik.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Perinsip otonomi luas yang berarti kekuasaan diberikan kepada daerah. Kekuasaan itu digunakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Namun, tetap harus memenuhi aturan hukum. Selain diberikannya kekuasaan kepada daerah, daerah juga akan diberikan kewenangan. Dimana daerah yang diberikan kepercayaan untuk mengurus daerahnya sendiri harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan atau diterapkan di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 prinsip pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab

Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal nasional, moneter dan agama.

- b. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan dari sumber-sumber yang terletak diwilayah tertentu, yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang saat ini. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberdayakan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, BUMN, dan penerimaan lainnya yang dihitung dalam ribuan rupiah pertahun. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Batubara, Lubis, Hasibuan, 2019)

2.4.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan pendapatan daerah itu sendiri. Dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) ini dapat berguna untuk membangun daerah otonom tersebut. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah

Yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah

Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperbolehkan jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Untuk daerah yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Badan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau menetapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.5 Retribusi Parkir

Retribusi atau pungutan daerah adalah pungutan daerah yang berguna untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pribadi atau komersial. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan daerah. Selain itu, keduanya wajib bagi masyarakat untuk memenuhinya.

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau suatu badan. Retribusi parkir merupakan suatu komponen pembentuk Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup penting, dari retribusi parkir diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara total. Maka yang diharapkan dari retribusi adalah kepatuhan masyarakat dalam memberikan retribusi kepada petugas. (Setiaji, Santoso 2016)

Muhammad Djafar Saidi (2010) dalam bukunya, retribusi menurut Munawir adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Jadi Retribusi merupakan suatu pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dan dipaksakan penagihannya. Retribusi berbeda dengan pajak, karena pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Lain halnya dengan retribusi yang menjadi komponen sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan.

2.5.1 Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan terhadap jasa parkir atau tempat parkir bagi masyarakat yang sudah menggunakan lahan parkir ditepi jalan umum. Beberapa daerah membuat kebijakan parkir ditepi jalan umum guna mempermudah masyarakat dan menambah penghasilan daerah. Parkir tepi jalan umum juga salah satu alternatif untuk kendaraan berhenti

yang dijaga oleh juru parkir yang sudah diutus oleh pihak pemerintah daerah yaitu dinas perhubungan.

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran tempat atau jasa parkir yang berada di pinggir ruas jalan. Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan suatu pungutan untuk masyarakat yang menghentikan kendaraannya dalam jangka waktu yang cukup lama (memarkirkan kendaraan). Dengan adanya tarif parkir membuat masyarakat lebih selektif untuk menggunakan jenis kendaraan dalam berpergian. Karena orang yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat akan memikirkan ketersediaan lahan parkir daripada orang yang membawa kendaraan bermotor roda dua. (Afandi, 2022)

2.5.2 Subjek dan Objek Retribusi Parkir

Subjek dari retribusi parkir ini adalah masyarakat yang memberikan retribusi parkir kepada juru parkir kemudian disetorkan kepada dinas perhubungan dan dinas perhubungan yang nantinya akan memasukkan dalam Pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan objek adalah tempat yang digunakan untuk mengistirahatkan kendaraan jika seseorang ingin kesuatu tempat, dan objek disini ialah tempat parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan subjek retribusi parkir dalam Dauly (2019) merupakan individu atau kelompok yang menerima dan memperoleh jasa parkir di tempat parkir baik tempat parkir khusus ataupun parkir di tepi jalan umum.

Subjek retribusi parkir merupakan orang atau kelompok yang menggunakan lahan parkir yang disebut dengan konsumen. Sedangkan objek retribusi parkir adalah penyediaan lahan parkir atau penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Penyediaan lahan parkir di tepi jalan umum yang artinya bahu jalan kanan dan kiri digunakan sebagai lahan parkir atas ketetapan pemerintah yang diawasi oleh dinas perhubungan dan dijaga oleh juru parkir atau petugas parkir yang sudah mendapatkan pelatihan dan menggunakan atribut yang menjadi ciri khas juru parkir dan menaati standar operasional prosedur (SOP) dalam bekerja. Sehingga diharapkan pemerintah benar-benar memikirkan lahan parkir yang berada ditepi jalan umum agar tidak mengganggu lalu lintas.

2.6 Parkir

Parkir merupakan yang termasuk dalam ruang publik yang sudah ada keberadaannya. Individu atau kelompok biasanya menuju ke tempat tujuan dan setelah sampai kendaraan ditinggal oleh pemiliknya atau parkir sebentar. Sehingga ada kegagalan untuk menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diizinkan, maka dapat menyebabkan hambatan lalu lintas, seperti kemacetan lalu lintas. Secara umum, peningkatan jumlah kendaraan yang menyebabkan meningkatnya permintaan tempat parkir.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996) mengemukakan bahwa parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan

pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat yang aman, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada dua pilihan yaitu, pola parkir paralel dan menyudut.

Syaiful (2013) mengemukakan bahwa pengertian parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang diyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang. Maka parkir tetap dibutuhkan bagi ruang publik ataupun sudah menjadi pelayanan publik yang harus tetap ada.

Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak pada kendaraan. Tempat parkir adalah suatu tempat yang digunakan untuk menaruh kendaraan roda empat atau roda dua yang akan ditinggalkan sementara oleh pemiliknya. Adapun tujuan adanya tempat parkir adalah untuk membantu kelancaran lalu lintas atau ketertiban lalu lintas dan untuk beristirahatnya alat transportasi yang ditinggal atau dititipkan oleh pemiliknya.

2.6.1 Kebutuhan Parkir

Kebutuhan tempat parkir adalah untuk mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas. Semakin tingginya jumlah tingkat kendaraan disuatu wilayah atau daerah maka semakin meningkatnya permintaan lahan parkir atau tempat parkir. Sehingga pemerintah daerah harus mempersiapkan lahan

guna untuk tempat masyarakat memarkirkan kendaraannya untuk ditinggal dan dijamin keamanannya. Maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman meninggalkan atau menitipkan kendaraannya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996) mengemukakan bahwa kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor, maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing dengan desain dan lokasi parkir. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kegiatan parkir ditepi jalan juga akan mengurangi kapasitas jalan dan meningkatkan kemacetan juga dapat menyebabkan kecelakaan. (Setiaji, Santoso, 2019)

Standar dalam memenuhi kebutuhan parkir adalah lahan yang cukup untuk menampung volume kendaraan yang ada. Seperti parkir di tepi jalan umum yang akan memerlukan pinggir ruas jalan untuk menampung kendaraan yang berhenti. Kekurangan dalam penyediaan tempat parkir dapat menyebabkan kemacetan dan menimbulkan permasalahan transportasi. Dengan tingkat kendaraan yang meningkat setiap tahunnya sudah dipastikan bahwa kebutuhan tempat parkir pasti akan meningkat.

Berdasarkan dengan adanya parkir di tepi jalan umum pemerintah sudah memastikan lebar jalan dan ruas tepi jalan yang akan digunakan sebagai lahan parkir agar tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas dan dikoordinir oleh juru parkir yang sudah ditetapkan oleh dinas perhubungan. Juru parkir juga merupakan kebutuhan parkir yang akan menertibkan dan

mengamankan daerah perparkiran. Juru parkir yang akan menerima bayaran dari pengguna lahan parkir.

2.6.2 Jenis-Jenis Parkir

Dirjen Perhubungan Darat (1996) mengemukakan bahwa parkir di bagi dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

a. *On Street Parking* (Parkir di badan jalan)

Merupakan keadaan parkir yang menggunakan kedua bahu jalan sebagai tempat kendaraan bermotor parkir.

b. *Off Street Parking* (Parkir di luar badan jalan)

Merupakan sebuah tempat yang dibuat khusus sebagai tempat parkir, misalnya sebuah mall yang diwajibkan untuk membuat tempat parkir khusus pengunjungnya.

Dirjen Perhubungan Darat (1996) mengemukakan untuk mendesain suatu pelataran parkir harus diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, rencana tata guna lahan dan kemudahan bagi pengguna. Adapun adanya desain tersebut guna untuk kebaikan tatanan suatu daerah agar terlihat teratur dan masyarakat menjadi nyaman dengan ruang publik yang disediakan atau diatur oleh pemerintah. Sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di jalan (Jocunda, Purnomo, 2014).

Berdasarkan jenis-jenis parkir, adapun parkir menurut statusnya sebagai berikut:

1. Parkir Umum

Parkir umum biasanya menggunakan lahan seperti lapangan, di tepi jalan yang pemeliharaannya dilakukan oleh pemerintah.

2. Parkir Khusus

Parkir khusus biasanya menggunakan lahan sendiri yang tidak di kelola oleh pemerintah tetapi dikelola oleh individu atau badan usaha.

3. Parkir Darurat

Perparkiran sementara yang sering di kunjungi biasanya memakai lahan seperti lapangan, ruas jalan, lahan sendiri yang dikelola pemerintah daerah, individu atau badan usaha.

4. Taman Parkir

Dibangun dengan standart bangunan perparkiran yang di fasilitasi oleh kebutuhan parkir yang dikelola oleh pemerintah suatu daerah.

5. Gedung Parkir

Tempat yang berupa bangunan dan dimanfaatkan untuk tempat parkir yang dikelola oleh pihak ketiga atau pemerintah daerah yang sudah mendapatkan izin pemerintah.

2.6.3 Pengendalian Parkir

Pengendalian parkir merupakan suatu kendali yang perlu dilakukan, karena tanpa adanya pengendalian akan terjadi ketidak teraturan dalam tata letak kota/daerah. Pengendalian parkir bertujuan agar mengurangi tingkat kemacetan di sebuah daerah dan membuat masyarakat teratur dalam meletakkan atau meninggalkan kendaraannya. Selain itu juga, pengendalian parkir berhubungan erat dengan pengawas ataupun penjaga tempat parkir.

Hobbs (1995) mengemukakan bahwa pengendalian parkir di jalan maupun di luar jalan merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan, polusi, dan kebisingan dapat ditekan, dan juga akan meningkatkan standar lingkungan dan kualitas pergerakan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Karakteristik parkir perlu diketahui untuk merencanakan lahan parkir. Beberapa karakteristik parkir menurut Hobbs (1995), terbagi menjadi enam yaitu:

1. Akumulasi parkir

Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang parkir di tempat sesuai dengan jenis dan maksud perjalanannya.

2. Durasi parkir

Durasi parkir merupakan waktu dari sebuah kendaraan yang parkir lama atau tidaknya.

3. Volume parkir

Volume parkir merupakan keadaan tempat parkir yang dapat menampung jumlah kendaraan.

4. Pergantian parkir

Pergantian parkir adalah periode tertentu untuk kendaraan berparkir.

5. Indeks parkir

Indeks parkir adalah pengguna ruang perparkiran.

6. Kapasitas parkir

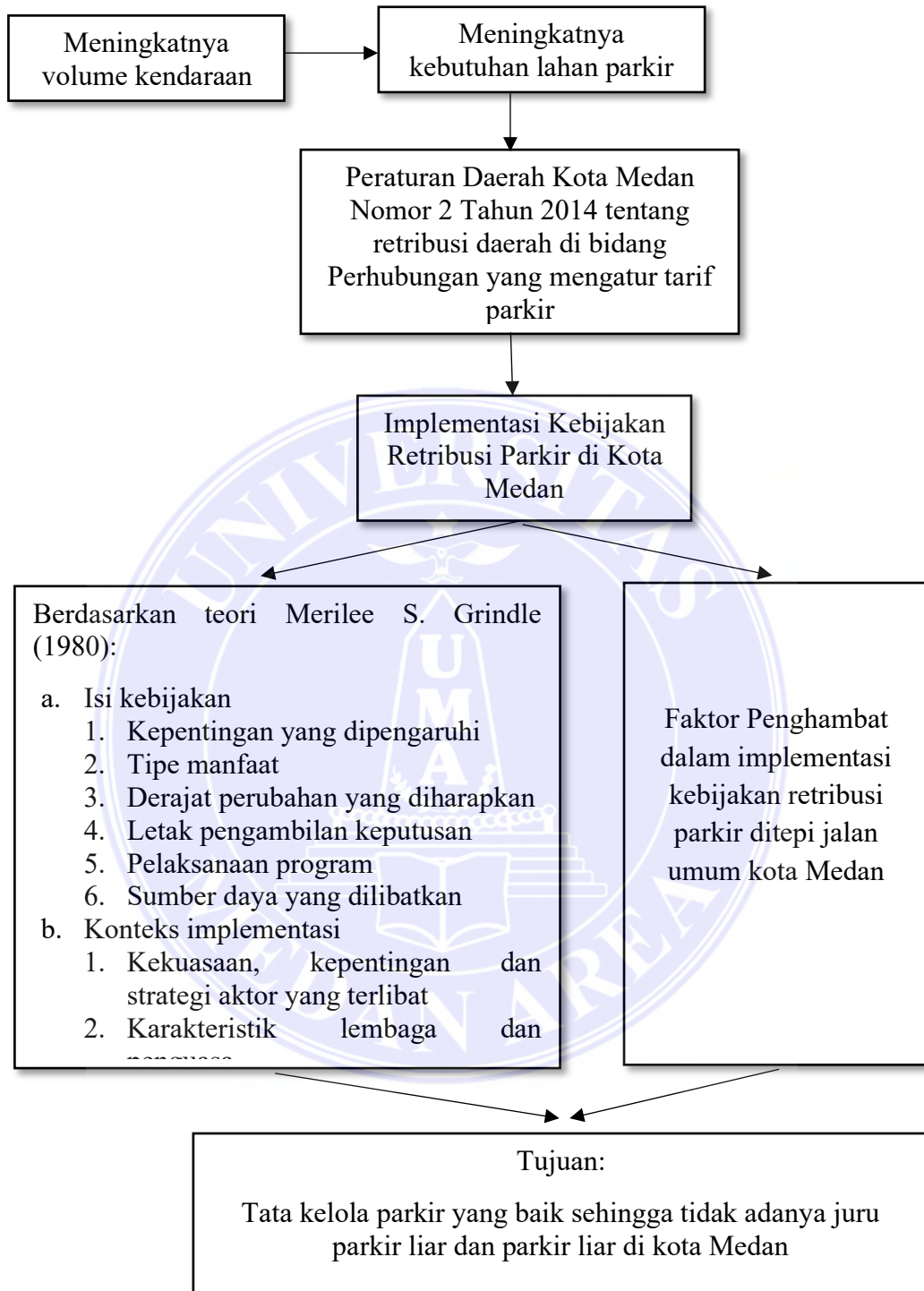
Kapasitas parkir merupakan banyaknya kendaraan yang dapat ditampung di suatu lahan parkir.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah alur piker yang berfungsi sebagai alat pijakan yang memungkinkan peneliti untuk menggali data yang ada di lapangan, agar tidak membuat persepsi sendiri. Sedangkan menurut Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut merupakan skema kerangka berpikir yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian.



Gambar 2.7 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: diolah oleh peneliti 2023

Meningkatnya jumlah kendaraan di kota Medan mengakibatkan meningkatnya juga kebutuhan akan tempat parkir. Hal ini dikarenakan setiap kendaraan membutuhkan tempat parkir untuk meletakkan kendaraan pada saat tidak bergerak. Pengertian parkir adalah keadaan diamnya suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam hal ini, parkir menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang ingin parkir dan mudah dijangkau. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mungkin diperlukan pengaturan parkir agar kebutuhan tersebut dapat diakses.

Salah satu upaya untuk menjelaskan pemersalahan yang terjadi dilapangan mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum adalah dengan mengacu kepada implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang retribusi daerah dibidang perhubungan yang sudah menetapkan tarif parkir ditepi jalan umum berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980), dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yaitu, isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Kemudian dengan adanya peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 dan berdasarkan teori Merilee S. Grindle dapat mengetahui bagaimana faktor penghambat dan pendukung dari implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan.

2.8 Penelitian Terdahulu

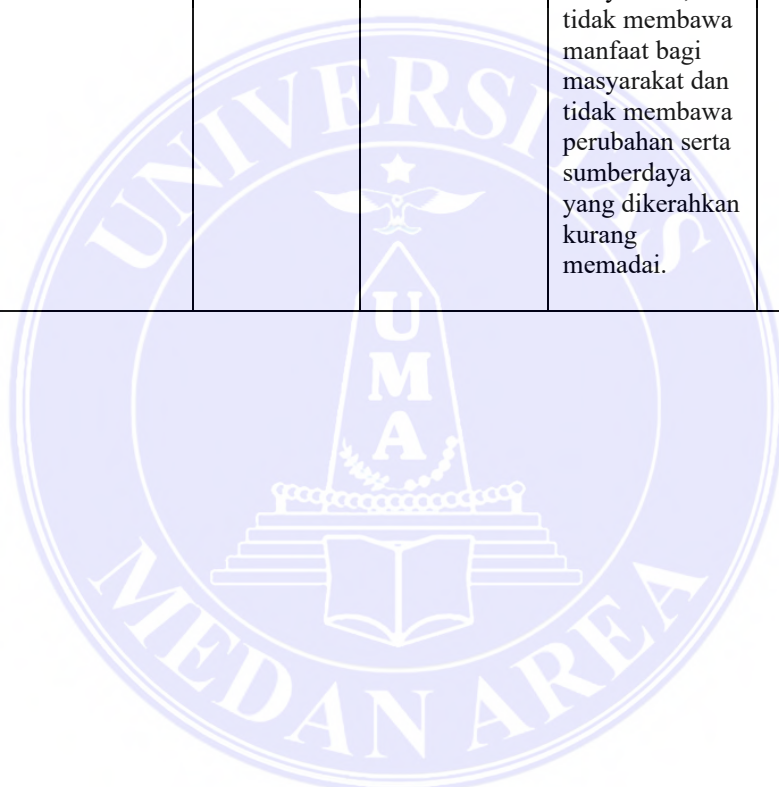
Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penulis dalam memahami teori yang akan digunakan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis:

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun	Judul	Uraian Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Hamidun Batubara, Marwan Lubis, Muhammad Husni Malik Hasibuan/2019/ Jurnal Teknik Sipil Universitas Negeri Medan dan Universitas Islam Sumatera Utara	Kajian Potensi Retribusi Parkir di Kota Medan	Untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi parkir terhadap PAD Kota Medan dan untuk menjelaskan hubungan antara potensi target atau anggaran dan realisasi parkir.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua ruas jalan yang bisa dijadikan tempat parkir pada badan jalan, kemauan membayar dari pengguna parkir di Kota Medan masih tergolong rendah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir pada badan jalan akan dapat tercapai dengan adanya penetapan Satuan Ruang Parkir (SRP) yang jelas.	Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum dan faktor penghambat yang terjadi terhadap retribusi perparkiran.
2.	Lyca Monica Daulay/2019/ Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan	Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Untuk melihat seberapa besar tingkat efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir pada tahun 2014-2016 dan untuk mengetahui seberapa besar pajak parkir dan retribusi parkir berkontribusi terhadap PAD Kota Medan Tahun 2014-2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2014 – 2016 cukup efektif dan untuk efektifitas retribusi parkir belum efektif.	Untuk mengetahui besarnya tingkat tarif perparkiran yang ditetapkan oleh Perda yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan.
3.	Darari Priya	Implementas	Untuk	Hasil penelitian	Untuk

No	Nama Dan Tahun	Judul	Uraian Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
	setiaji dan R Slamet Santoso/2019/ Jurnal Departemen Administrasi, Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro	i Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal	menganalisis kesesuaian Implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 dan untuk menganalisis faktor-faktor penentu dalam proses Implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum kabupaten Tegal.	menunjukkan bahwa implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2014 dapat dikatakan belum efektif, dikarenakan beberapa peraturan Daerah tidak dijalankan dengan maksimal.	mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum kota Medan dan mengetahui kendala-kendala apa saja di lapangan.
4.	Vincent Kevin Rumengan, Ismail Rachman, dan Neni Kumayas /2020/ Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah.	Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa.	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi parkir di terminal kowangkoang dalam peningkatan asli daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan penghasilan asli daerah kabupaten minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan prasana yang memadai sehingga masyarakat masih banyak mengeluhkan kenyamanan dan keamanan perparkiran di area terminal kawangkoang.	Untuk mengetahui bagaimana kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum kota medan sudah berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan efektif.
5.	Muhammad Afandi/2022/	Implementasi Kebijakan	Untuk menganalisis	Hasil penelitian menunjukkan	Untuk mengetahui

No	Nama Dan Tahun	Judul	Uraian Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
	Jurnal Kebijakan Publik	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Palu.	bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di tepi jalan umum Kota Palu dinilai kurang optimal, dimana kebijakan yang dibuat tidak berpengaruh untuk masyarakat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak membawa perubahan serta sumberdaya yang dikerahkan kurang memadai.	kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan.



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif. Sedangkan dalam penelitian dengan metode kualitatif menurut Sarman (2004) penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data secara ilmiah dari berbagai sudut informasi yang dikembangkan, dibangun, dan disampaikan oleh individu atau suatu lembaga (komunitas) yang merupakan suatu objek dan subjek dalam penelitian sosial.

Pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui informan-informan peneliti dengan cara observasi, wawancara, survei dan dokumentasi. Maka dengan penelitian ini peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan yang diharapkan memiliki gambaran yang jelas mengenai masalah Implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Medan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek atau tempat untuk penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan tepatnya di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk melihat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Medan. Selain itu juga,

untuk mendapatkan informasi dalam pemecahan rumusan masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan (studi kasus pada dinas perhubungan kota Medan). Adapun tahapan dan rincian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sep 2023
1.	Pengajuan Judul	■								
2.	Penyusunan Proposal	■								
3.	Pendaftaran Seminar Proposal		■							
4.	Seminar Proposal			■						
5.	Revisi Proposal				■					
6.	Pelaksanaan Penelitian				■					
7.	Penulisan Hasil Penelitian					■				
8.	Bimbingan Hasil					■				
9.	Seminar Hasil						■			
10.	Perbaikan Skripsi							■		
11.	Sidang Meja Hijau								■	
12.	Penyerahan Hasil Skripsi									■

Sumber: diolah oleh peneliti 2023

3.4 Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi pada berbagai jenis data yang dapat dikumpulkan sebagai berikut:

a) **Data primer**

Data primer dalam penelitian ini mencakup semua informasi yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan adalah seseorang atau kelompok yang dapat memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

b) **Data sekunder**

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi beberapa sumber yaitu kajian Pustaka atau buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal yang mengenai dengan penelitian implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum kota Medan.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau instansi yang dapat memberikan informasi. Informan adalah orang-orang dari lokasi penelitian yang mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, dapat berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk sehingga dapat menggali informasi lebih mendalam lagi. Secara alami peneliti dan

informan membentuk tiga informan: informan kunci, informan utama dan informan tambahan antara lain:

1. Informan kunci

Merupakan seseorang atau kelompok yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu bagian perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Informan utama

Merupakan seseorang atau kelompok yang terlibat secara sosial dalam penelitian yang dilakukan. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu juru parkir ditepi jalan umum Kota Medan berjumlah 3 orang.

3. Informan tambahan

Merupakan seseorang atau kelompok yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial penelitian. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang masyarakat yang menggunakan parkir di tepi jalan umum kota Medan.

Tabel 3.5
Informan penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan	Keterangan
1.	Bapak Mhd. Zein Lubis, ST	Inspektur Sub bidang perparkiran	Informan kunci
2.	Ibu Bella	Juru Parkir Jalan Perintis Kemerdekaan	Informan utama
3.	Bapak Nasution	Juru Parkir Jalan Sisingmangaraja (depan Ramayana teladan)	Informan utama
4.	Abang radfi	Juru parkir Jalan Rel Kereta api (depan lapangan merdeka)	Informan uambahan
5.	Kak riri	Masyarakat	Informan tambahan
6.	Mbak juni	Masyarakat	Informan tambahan
7.	Kak laras	Masyarakat	Informan tambahan

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, memiliki tiga teknik dalam pengumpulan data yang utama yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk meningkatkan kepercayaan yang tinggi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi.

Menurut Julmi (2020) observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi non-partisipan dan observasi partisipan. Partisipan non-partisipan yaitu peneliti mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sedangkan dalam observasi partisipan, peneliti ikut berpartisipasi menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Peneliti sebagai

pengamat dan partisipan, belajar melalui pengalaman langsung. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan suatu aktivitas, individu, serta kejadian berdasarkan sudut pandang individu.

Dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung kantor dinas perhubungan kota Medan dan mendatangi langsung tempat parkir ditepi jalan umum di beberapa jalan dikota Medan.

2. Wawancara.

Menurut Sugiyono (Esterberg, 2002) bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dalam tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada kepala bagian perparkiran yang berada di Dinas Perhubungan Kota Medan, Juru parkir yang berada ditepi jalan umum kota Medan, dan beberapa masyarakat yang menggunakan perparkiran ditepi jalan umum kota Medan.

3. Dokumentasi.

Merupakan suatu proses atau aktivitas dalam menyediakan dokumen-dokumen sebagai bukti yang akurat yang didapat melalui berbagai sumber-sumber informasi. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini seperti foto-foto keadaan perparkiran di Kota Medan dan foto-foto mengenai wawancara kepada sumber-sumber informasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Huberman (1984) dalam buku Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Adapun aktivitas dalam menganalisis data yaitu:

1. pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi

Reduksi data merupakan suatu data yang diperoleh di lapangan kemudian ditulis secara rinci. Kemudian setelah mengumpulkan data laporan tersebut direduksi, dipilih hal-hal yang pokok, dirangkum difokuskan pada hal-hal yang penting dan ditentukan tema atau pola sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas.

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *flowchart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Pada teknik ini, kemudian peneliti harus mencari makna, pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan serta faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan menurut Merille S Grindle masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih belum memenuhi indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti:

a. Isi kebijakan

Dimana didalamnya ada tiga sub indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan yang sudah berjalan dengan baik yaitu kepentingan yang dipengaruhi, letak pengambilan keputusan dan pelaksana program.

b. Konteks implementasi

Dimana didalamnya memiliki memiliki tiga sub indikator akan tetapi hanya satu sub indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, untuk dua sub indikator lainnya belum berjalan dengan baik.

2. Faktor penghambat Implementasi kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum kota Medan.

1. Masyarakat yang memarkirkan kendaraan tidak ditempat resmi (Parkir liar).

2. Juru parkir tidak memberikan kartu tanda parkir (Karcis) kepada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum.
3. Juru parkir yang tidak menggunakan atribut saat bekerja salah satunya tidak menggunakan bet nama sebagai identitas.
4. Masih ditemukannya juru parkir liar.

5.2 Saran

Setelah menganalisis hasil dari penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu:

1. Diperlukannya sosialisasi dan sanksi terhadap juru parkir agar mereka tidak anggap remeh mengenai atribut, seperti yang sudah diwajibkan oleh Dinas Perhubungan yaitu bet nama. Karena sepanjang peneliti melakukan penelitian ada beberapa juru parkir tidak menggunakan bet nama.
2. Diperlukan pembenahan terhadap transportasi umum sebagai salah satu upaya yang berfungsi untuk mendorong masyarakat agar mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya di Kota Medan yang menyebabkan akan diperlukannya lahan parkir yang lebih besar dan banyak lagi untuk kedepannya.
3. Melakukan pemeriksaan mendadak sebagai pemantauan lapangan langsung diberbagai titik lokasi kelas parkir. Perlu sekali untuk diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

4. Diperlukannya juga sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi rambu dilarang parkir agar tidak menjadi parkir liar dan pada akhirnya akan diangkut paksa jika ada razia gabungan. Sehingga diperlukannya sosialisasi agar masyarakat sadar akan mematuhi peraturan yang ada.
5. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan retribusi parkir ditepi jalan umum. Contohnya juru parkir yang meminta tarif parkir tidak sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik Cetakan Pertama. Alfabeta Bandung.
- Agustino, Leo. 2019. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Anderson, James. 1964. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Cps.
- Anggoro, Dwi, Damas. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama. UB Press Malang.
- Harbani, Pasolong. 2019. Teori Administrasi Publik Cetakan Kesembilan. Bandung: Alfabeta.
- Jenkins, W.I. 1978. Policy Analysis. Martin Robertson: Oxford
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Cetakan Pertama. UNG Press Gorontalo.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Baru Cet.4, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nogi, Hessel dkk. 2008. Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2014. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuryanti Mustari, 2015, Pemahaman Kebijakan Publik, Yogyakarta, LeutikaPrio
- Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2019. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Tahir. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William N. Dunn. 2000. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjahmada University Press

Jurnal

- Darari Priya Setiaji, & R Slamet Santoso. 2019. Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 55–69.
- Fauzi, A. 2019. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119.
- H. Riza Sirait, Rudi Salam Sinaga, & Maksum Syahri Lubis. 2021. Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 terhadap Kondisi Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Medan.
- Hamidun Batubara, Lubis, M., & Hasibuan, M. 2019. Kajian Potensi Retribusi Parkir di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknik SEMNASTEK UISU*, 2(1), 114–119.
- Mahendra, M., Isnaini Isnaini, & Rudi Salam Sinaga. 2021. The Implementation of Langkat Regent Regulation Number 19 of 2019 Concerning Procedures for Procurement of Goods and Services in Village (Study in the Village of Stabat Baru). 4(3), 3473–3484.
- Muhammad Afandi. 2022. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 99–103.
- Putri Mustabsirah, Maksum Syahri Lubis, & Rudi Salam Sinaga. 2021. Implementation of the Personnel Management Information System (SIMPEG) Policy at the Medan City Personnel and Human Resources

- Development Agency. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(4).
- Reza Fachrozi, Isnaini Isnaini, & Rudi Salam Sinaga. 2021. Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit. 11(1), 151–159.
- Ronal Dison, Suharno Suharno, & Rudi Salam Sinaga. 2014. Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11756–11767.
- Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, & Yundy Hafizrianda. 2017. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1), 217589.
- Vincent Kevin Rumengan, Rachman I, Neni Kumayas. 2020. Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*.
- Widyastuti, A., Resmawan, E., & Alaydrus, A. 2018. Studi tentang pengelolaan dan penataan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Skripsi

- Prasetyo, P. 2003. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sanata Dharma.
- Prayoga, A. D. 2021. Analisis Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam - UPB
- Lyca. M. D. 2023. Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Pancabudi.ac.id.

Artikel

Aldi, N. 2022, October 13. *Jukir di Medan Minta Uang Parkir Rp 5 Ribu, Langsung Ditindak Dishub*. Detiksumut; detikcom.

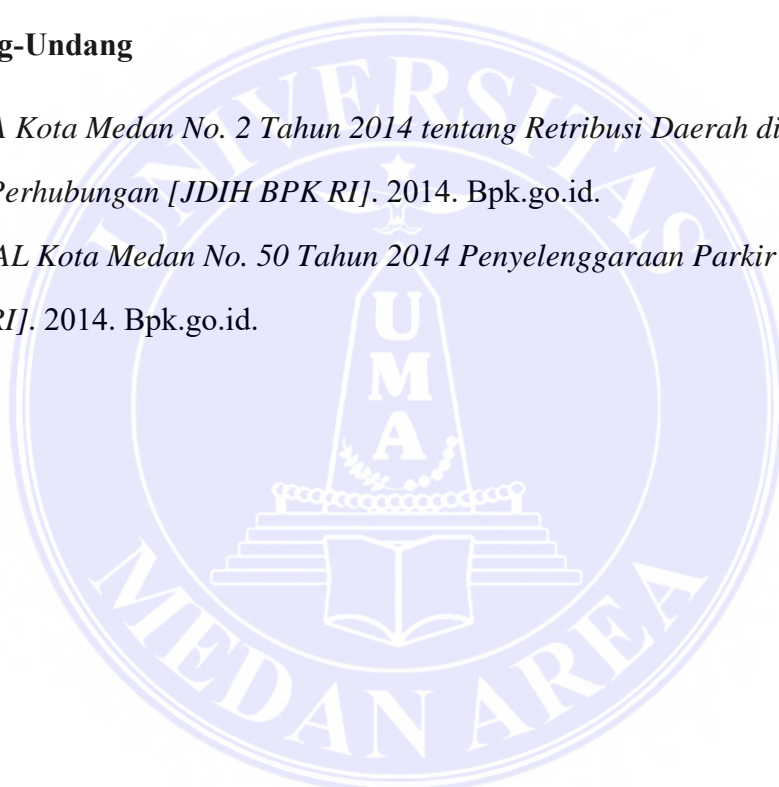
Wisely, G. 2022, October 8. *Jukir Liar di Medan Ditangkap Polisi*. Detiksumut; detikcom.

Wisely, G. 2022, September 14. *Juru Parkir Liar yang Dimarahi Bobby Ditangkap dan Dibina!* Detiknews; detikcom.

Undang-Undang

PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan [JDIH BPK RI]. 2014. Bpk.go.id.

PERWAL Kota Medan No. 50 Tahun 2014 Penyelenggaraan Parkir [JDIH BPK RI]. 2014. Bpk.go.id.



LAMPIRAN

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Pehubungan Kota Medan

a) Kepentingan yang dipengaruhi:

1. Apakah tarif yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir?
2. Apakah ada aduan keberatan dari masyarakat mengenai tarif parkir yang telah ditetapkan?

b) Tipe Manfaat

1. Berapa besar setoran yang diminta oleh dinas kepada petugas parkir?

c) Derajat Perubahan yang diharapkan

1. Apa perubahan yang diharapkan dalam kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum saat ini?
2. Apakah dinas perhubungan mewajibkan juru parkir menggunakan atribut lengkap saat bertugas?
3. Apakah dinas perhubungan memberikan kartu tanda pengguna parkir kepada juru parkir?

d) Letak Pengambilan Keputusan

1. Apakah pihak dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir dilapangan?

2. Dalam melakukan pengawasan, apakah dilakukan secara rutin atau dilakukan pada saat adanya pengaduan saja?
 3. Apakah pengawasan yang dilakukan pihak dinas perhubungan berjalan dengan baik?
- e) Pelaksana Program
1. Apakah program-program Dinas perhubungan mengenai parkir ditepi jalan umum ini sudah berjalan dengan baik?
- f) Sumber Daya yang dilibatkan
1. Bagaimana dinas perhubungan meningkatkan kualitas aparatur pegawainya?
- g) Adakah pengawasan gabungan antara dinas Perhubungan dengan dinas lain guna menertibkan parkir di kota Medan?
- h) Bagaimana penegakan peraturan yang dilakukan dalam penertiban perparkiran ditepi jalan umum Kota Medan dan waktu kerja untuk juru parkir itu berapa jam?
- i) Apakah sudah ada sanksi bagi juru parkir yang terlambat memberikan setoran atau tidak lengkap dalam memakai perlengkapan saat bertugas?
- j) Apasajakah Faktor pendukung dan Faktor penghambat dinas perhubungan dalam menerapkan kebijakan parkir ditepi jalan umum kota Medan?

B. Juru Parkir tepi jalan umum Kota Medan

a) Kepentingan yang dipengaruhi:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tarif parkir yang sudah ditetapkan dalam Peraturan daerah?
2. Apakah tarif itu sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir?

b) Tipe manfaat

1. Adakah tarif setoran yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan?

c) Derajat perubahan yang diharapkan

1. Apa perubahan yang diharapkan bapak/ ibu juru parkir saat ini mengenai kebiakan parkir ditepi jalan umum?
2. Apakah dinas perhubungan mewajibkan juru parkir menggunakan atribut lengkap saat bertugas?
3. Apakah Bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir?

d) Letak Pengambilan Keputusan

1. Adakah dinas perhubungan melakukan kunjungan kepada juru parkir disaat bekerja?
2. Jika ada, apakah pengawasan dilakukan secara rutin?

e) Sumber daya yang dilibatkan

1. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti diklat (Pendidikan atau pelatihan) sebagai juru parkir?

f) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pemungutan parkir ditepi jalan umum Kota Medan?

C. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir Kota Medan

a) Kepentingan yang dipengaruhi:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tarif parkir di tepi jalan umum?
2. Menurut bapak/ibu apakah tarif parkir yang ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat?

b) Derajat perubahan yang diharapkan

1. Apa perubahan yang diharapkan sebagai pengguna jasa parkir untuk parkir ditepi jalan umum saat ini?
2. Apakah menurut bapak/ibu juru parkir wajib menggunakan atribut lengkap saat bertugas?
3. Ketika parkir apakah bapak/ibu menerima bukti sebagai tanda pengguna jasa parkir?

c) Derajat Pengambilan Keputusan

1. Pernahkah bapak/ibu melihat petugas dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir?

d) Sumber daya yang dilibatkan

1. Menurut bapak/ibu apakah juru parkir perlu mengikuti diklat (Pendidikan atau pelatihan)

e) Apakah bapak/ibu pernah melihat Dinas Perhubungan melakukan pengawasan gabungan dengan dinas lain?

f) Menurut bapak/ibu yang menjadi faktor penghambat dari parkir tepi jalan umum Kota Medan saat ini?

Lampiran 2:

Tempat Lokasi Parkir Pada Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum

a. Lokasi Parkir Kelas I

No	NAMA JALAN	BATAS JALAN
KECAMATAN MEDAN BARAT		
1	Jalan Jenderal Ahmad Yani	m/d sp. Jalan Palang Merah s/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani VII
2	Jalan H. Adam Malik	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Jalan Guru Patimpus
3	Jalan Balai Kota	m/d sp. Jalan Pulo Penang s/d sp. Jalan Pos (dh. Jalan Bukit Barisan)
4	Jalan Balai Kota	m/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani VII s/d sp. Jalan Raden Saleh
5	Jalan Hindu	m/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani VII s/d sp. Jalan Siswomiharjo
6	Jalan Palang Merah	m/d sp. Jalan Pemuda s/d sp. Jalan Stasiun Kereta Api
7	Jalan Pos	m/d sp. Jalan Balai Kota s/d sp. Jalan Stasiun Kereta Api
8	Jalan Pulo Penang	m/d sp. Jalan Balai Kota s/d sp. Jalan Stasiun Kereta Api
9	Jalan Putri Hijau	m/d sp. Jalan Perintis Kemerdekaan s/d Rel Kereta Api
10	Jalan Putri Merak Jingga	m/d sp. Jalan Putri Hijau s/d sp. Jalan Perintis Kemerdekaan
11	Jalan Siswomiharjo	m/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani s/d Jembatan Sei Deli
12	Jalan Stasiun Kertea Api	m/d sp. Jalan H. M. Yamin s/d sp. Jalan Palng Merah
13	Jalan K.L. Yos Sudarso	m/d Rel Kereta Api s/d Pasar Palapa Pul Brayan
14	Jalan Prof. H. M. Yamin	m/d sp. Jalan Putri Hijau s/d Rel Kereta Api
KECAMATAN MEDAN DENAI		
1	Jalan Abdul Rahman Hakim	m/d sp. Jalan H. M. Joni s/d Rel Kereta Api
KECAMATAN MEDAN KOTA		
1	Jalan Asia	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan M. H. Thamrin
2	Jalan Asia	m/d sp. Jalan M.H. Thamrin s/d sp. Jalan Kapten Jumhana
3	Jalan Cirebon	m/d sp. Jalan Haryono MT s/d sp. Jalan Pandu
4	Jalan Haryono MT	m/d sp. Jalan Irian Barat s/d sp. Jalan Pandan
5	Jalan Haryono MT	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Martinus Lubis
6	Jalan Pandu	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d Rel Kereta Api
7	Jalan Dr. Sutomo	m/d sp. Jalan Rahmadsyah s/d sp. Jalan Sambu
8	Jalan Sustrisno	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Abdul

No	NAMA JALAN	BATAS JALAN
		Rahman Hakim
9	Jalan M.H. Thamrin	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Sutrisno
10	Jalan M.H. Thamrin	m/d sp. Jalan H. M. Yamin s/d sp. Jalan Dr. Wahidin
11	Jalan M.H. Thamrin	m/d pintun keluar Thamrin Plaza s/d sp. Jalan Asia
12	Jalan H. M. Joni	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim
13	Jalan Sisimangaraja	m/d sp. Jalan Pandu s/d sp. Jalan Ir. H. Juanda
14	Jalan Rahmadsyah	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Laksana
KECAMATAN MEDAN TIMUR		
1	Jalan Gunung Krakatau	m/d sp. Jalan Karantina s/d sp. Jalan Alumunium Raya
2	Jalan Irian Barat	m/d sp. Jalan Veteran s/d sp. Jalan Haryono MT
3	Jalan Jawa	m/d sp. Jalan H. M. Yamin s/d sp. Jalan Veteran
4	Jalan Perintis Kemerdekaan	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Purwo
5	Jalan Dr. Sutomo	m/d sp. Jalan Sambu s/d sp. Jalan H. M Yamin, S. H
6	Jalan Dr. Sutomo	m/d sp. Jalan H. M. Yamin, S. H. s/d sp. Jalan Ir. H. Juanda
7	Jalan Prof. H. M. Yamin	m/d sp. Rel Kereta Api s/d sp. Jalan M. H. Thamrin
KECAMATAN MEDAN PETISAH		
1	Jalan Jenderal Gatot Subroto	m/d sp. Jalan Kapten Muslin s/d sp. Jembata Sei Babura
2	Jalan Gajah Mada	m/d sp. Jalan Darussalam s/d sp. Jalan Sultan Iskandar Muda
3	Jalan Gajah Mada	m/d sp. Jalan Sultan Iskandar Muda s/d sp. Letnan Jenderal S. Parman
4	Jalan Glugur	m/d sp. Jalan Rotan s/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto
5	Jalan Sultan Iskandar Muda	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Gajag Mada
6	Jalan Kejaksanaan	m/d sp. Jalan Pengadilan s/d Jembatan Sei Babura
7	Jalan Nibung Raya	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Perpustakaan
8	Jalan Letnan Jenderal S. Parman	m/d sp. Jalan Gajah Mada s/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto
9	Jalan K. H. Zainul Arifin (07.00 s/d 19.00)	m/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol s/D Jembatan Sei Babura
10	Jalan K. H. Zainul Arifin (19.00 s/d 06.00)	m/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol s/D Jembatan Sei Babura
KECAMATAN MEDAN AREA		
1	Jalan Sumatera (Jalan K. S. Tubun)	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Madong Lubis

No	NAMA JALAN	BATAS JALAN
KECAMATAN MEDAN MAIMUN		
1	Jalan Pemuda	m/d sp. Jalan Letna Jenderal Supranto s/d sp. Jalan Palng Merah
2	Jalan Letnan Jenderal Supranto	m/d sp. Jalan Pemuda s/d Jembata Sei Deli
3	Jalan Brigadir Jenderal Zein Hamid	m/d sp. Jalan Sakti Lubis s/d sp. Jalan Jenderal Andul Haris Nasution
4	Jalan Sultan Makmun Al-Rasyid (dh. Jalan Brigadir Jenderal Katamso)	m/d sp. Jalan Letnan Jenderal Supranto s/d sp. Jalan Ir. H. Juanda
5	Jalan Ir. Juanda	m/d sp. Jalan Brigadie Jenderal Katamso s/d sp. Jalan Sisingamangaraja
KECAMATAN MEDAN POLONIA		
1	Jalan Tuanku Imam Bonjol	m/d sp. Jalan Jenderal Sudirman s/d sp. Jalan H. Misbah
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL		
1	Jalan Dr. Setia Budi	m/d sp. Jalan Sunggal s/d sp. Jalan Dr. Mansyur
KECAMATAN MEDAN SELAYANG		
1	Jalan Dr. Mansyur	m/d sp. Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting s/d sp. Jalan Dr. Setia Budi
2	Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting	m/d sp. Jalan K. H. Wahid Hasyim s/d Pajak Sore Padang Bulan
KECAMATAN MEDAN HELVETIA		
1	Jalan Kapten Muslim	m/d sp. JalanJenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Gaperta
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN		
1	Jalan Prof. H. M. Yamin, S. H	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Williem Iskandar
KECAMATAN MEDAN BARU		
1	Jalan Sultan Iskandar Muda	m/d sp. Jalan Gajah Mada s/d sp. Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting

b. Lokasi Parkir Kelas II

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
KECAMATAN MEDAN BARAT		
1	Jalan Jenderal Ahmda Yani VII	m/d sp. Jalan Balai Kota /s/d Ujung Jalan Ahmad Yani VII
2	Jalan Jenderal Ahmda Yani I	m/d sp. Jalan Mesjid s/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani
3	Jalan Jenderal Ahmda Yani II	m/d sp. Jalan Perniagaan s/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani
4	Jalan Jenderal Ahmda Yani III	m/d sp. Jalan Stasiun Kereta Api s/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani
5	Jalan Jenderal Ahmda Yani IV	m/d sp. Jalan Mesjid s/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani
6	Jalan Jenderal Ahmda Yani V	m/d sp. Jalan Stasiun Kereta Api s/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani
7	Jalan Sunan Ampel	m/d sp. Jalan Mesjid s/d sp. Jalan Palang Merah
8	Jalan A. R. Syihab	m/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani VII s/d sp. Jalan Raden Saleh
9	Jalan A. R. Syihab	m/d sp. Jalan Raden Saleh s/d Jalan Jenderal Ahmad Yani VII
10	Jalan Arab	m/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani s/d sp. Jalan Palang Merah
11	Jalan Brigadir Jenderal Bejo	m/d Jembatan Sei Deli s/d Titi Parit Basuki
12	Jalan Benteng	m/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Bejo s/d sp. Ujung
13	Jalan Bilal	m/d sp. Rel Kereta Apis s/d Titi Parit Busuk
14	Jalan Budi Keadilan	m/d sp. Jalan Merdeka s/d sp. Jalan Pembangunan
15	Jalan Budi Kemamuran	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Jalan Budi Pengabdian
16	Jalan Budi Kemasyarakatan	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d Rel Kereta Api
17	Jalan Budi Kemenangan	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Jalan Budi Kemenangan
18	Jalan Budi Pekerti	m/d sp. Jalan Budi Pembangunan s/d sp. Jalan Budi Kemenangan
19	Jalan Budi Pembangunan	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d Rel Kereta Api
20	Jalan Datuk	m/d sp. Jalan Mesjid s/d Ujung Jalan Datuk
21	Jalan Guru Patimpus	m/d sp. Jalan Laboratorium s/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto
22	Jalan Karya Celincing	m/d sp. Jalan Karya s/d Jembatan Sei Deli
23	Jalan Karya	m/d Rel Kereta Api s/d sp. Jalan Kapten Sumarsono
24	Jalan Kelapa	m/d sp. Jalan Guru Patimpus s/d sp. Jalan Sei Deli
25	Jalan Kepribadian	m/d sp. Jalan A. R. Syihab s/d sp. Jalan Ahmad Yani VII
26	Jalan Kumango	m/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani III s/d sp. Jalan Pulo Penang

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
27	Jalan Makmur	m/d sp. Jalan Karya s/d sp. Jalan H. Adam Malik
28	Jalan Myor Baru	m/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Bejo s/d sp. Jalan Mayor
29	Jalan Mayor	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Ujung Jalan Mayor
30	Jalan Merdeka	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Rel Kereta Api
31	Jalan Mesjid	m/d sp. Jalan Jenderal Ahmad Yani VII s/d sp. Jalan Palang Merah
32	Jalan Palang Merah	m/d Jembatan Sei Deli s/d sp. Jalan Pemuda
33	Jalan Pasar Palapa	Komplek Jalan Lingkungan Pasar Palapa dan Komplek Deli Indah Pulo Brayon
34	Jalan Pembelian	m/d sp. Jalan Perniagaan s/d sp. Jalan Stasiun Kereta Apin
35	Jalan Perniagaan Baru	m/d sp. Jalan Perniagaan s/d sp. Stasiun Kereta Apin
36	Jalan Perniagaan	m/d sp. Jalan Palang Merah s/d sp. Jalan Pulau Penang
37	Jalan Putri Hijau Baru	m/d Sekitaran Keliling Jalan Putri Hijau Baru
38	Jalan Putri Hijau Dalam	m/d sp. Jalan Putri Hijau s/d Ujung Jalan
39	Jalan Putri Hijau I	m/d sp. Jalan Puri Hijau s/d sp. Jalan Merak Jingga
40	Jalan Putri Hijau II	m/d sp. Jalan Puri Hijau s/d Jalan. Putri Hijau I
41	Jalan Raden Saleh Dalam	m/d sp. Jalan Raden Saleh s/d Ujung
42	Jalan Raden Saleh	m/d sp. Jalan Balai Kota s/d Jembatan Sei Deli
43	Jalan Stasiun Dalam	m/d sp. Jalan Stasiun s/d sp. Jalan Bukit Barisan Dalam
44	Jalan Tembakau Deli	m/d sp. Jalan Balai Kota s/d sp. Ujung Jalan Tembakau Deli
45	Jalan Temenggung	m/d sp. Jalan Mesjid s/d sp. Jalan Arab
46	Jalan Tengku Amir Hamzah	m/d sp. Jalan H. Adam Malik s/d sp. Jalan Gaperta
47	Jalan K. L. Yos Sudarso	m/d Pasar Palapa Pulo Brayon s/d Jembatan Sei Deli
KECAMATAN MEDAN DENAI		
1	Jalan Bromo	m/d sp. Jalan Bhakti s/d sp. Jalan Bromo Ujung
2	Jalan Amaliyah	m/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim s/d Gang di belakang Pasar Inpres
3	Jalan Denai	m/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim s/d sp. Jalan Panglima Denai
4	Jalan Industri	m/d sp. Jalan Mandala By Pass s/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim
5	Jalan Taruna	m/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim s/d Batas Gang di belakang Pasar Inpres
6	Jalan Timah Putih	m/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim s/d Ujung Jalan

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
7	Jalan Nikel IV	m/d sp. Jalan Nikel s/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim
8	Jalan Saikum (Asia Makmur)	m/d sp. Jalan Kapten Jumhana s/d Gang Intan
KECAMATAN MEDAN KOTA		
1	Jalan Aceh	m/d sp. Jalan HOS Cokroaminoto s/d sp. Jalan Wahidin
2	Jalan Amaliun	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Ismaliyah
3	Jalan Ambon	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Martinus Lubis
4	Jalan Amuntai	m/d sp. Jalan Rahmadsyah s/d sp. Jalan Sawahlunto
5	Jalan Andalas	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Surakarta
6	Jalan Ansari	m/d sp. Jalan Sun Yat Sen s/d sp. Jalan M. H. Thamrin
7	Jalan Arjuna	m/d sp. Jalan Kawa s/d sp. Jalan Bintang
8	Jalanan Bakaran Batu	m/d sp. Jalan Sutrisno s/d sp. Jalan Dr. Wahidin
9	Jalan Balige	m/d sp. Jalan HOS Cokroaminoto s/d sp. Jalan KS Tubun
10	Jalan Bandung	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Palangkaraya
11	Jalan Bangka	m/d sp. Jalan Sambu s/d sp. Jalan Veteran
12	Jalan Banjarmasin	m/d sp. Jalan Rahmadiyah s/d sp. Jalan Veteran
13	Jalan Baru	m/d sp. Jalan Turi s/d sp. Jalan Stadion Teladan I
14	Jalan Barus	m/d sp. Jalan Jember s/d sp. Jalan Bogor
15	Jalan Bawean	m/d sp. Jalan Sutomo s/d sp. Jalan Irian Barat
16	Jalan Bedagai	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin s/d sp. Jalan Sei Kera
17	Jalan Bengkalis I	m/d sp. Jalan Riau s/d sp. Jalan Sambu
18	Jalan Bengkalis II	m/d sp. Jalan Riau s/d sp. Jalan Sambu
19	Jalan Beruang Dalam	m/d sp. Jalan Beruang s/d sp. Jalan Banteng
20	Jalan Beruang	m/d sp. Jalan Madong Lubis s/d sp. Jalan Gajah
21	Jalan Biawak	m/d sp. Jalan Bingkarung s/d sp. Jalan Kelinci
22	Jalan Bogor	m/d sp. Jalan Palangkaraya s/d sp. Jalan Sutomo
23	Jalan Bukit Barisan Dalam	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. s/d sp. Jalan Pos
24	Jalan HOS Cokroaminoto	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Sampali
25	Jalan Flores	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan FL. Tobing
26	Jalan FL. Tobing	m/d sp. Jalan Sei Kera s/d sp. Jalan Merbabu
27	Jalan Gajah	m/d sp. Jalan HOS Cokroaminoto s/d sp. Jalan Dr. Wahidin
28	Jalan Mahatma Gandhi	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Besi

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
29	Jalan Garut	m/d sp. Jalan Bandung s/d sp. Jalan Haryono MT
30	Jalan Gedeh	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Salak
31	Jalan Jember	m/d sp. Jalan Palangkaraya s/d sp. Jalan Cirebon
32	Jalan Kapuas	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Samarinda
33	Jalan Karimun	m/d sp. Jalan Riau s/d sp. Jalan Sambu
34	Jalan Kawi	m/d sp. Jalan Haryono.T s/d sp. Jalan Merbabu
35	Jalan Kota Cane	m/d sp. Jalan Tilak s/d sp. Jalan Yoserizal
36	Jalan Kuantan	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Kalianda
37	Jalan Kuningan	m/d sp. Jalan Mahatma Gandhi s/d Ujung Jalan Kuningan
38	Jalan Lahat	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Kalianda
39	Jalan Lamlo	m/d sp. Jalan Kalianda s/d sp. Jalan Asia
40	Jalan Lampung	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Yoserizal
41	Jalan Lebong	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Yoserizal
42	Jalan Logam	m/d sp. Jalan Mahatma Gandhi s/d sp. Jalan Pasar Timah
43	Jalan Martapura	m/d sp. Jalan Pandu s/d sp. Jalan Pandu
44	Jalan Martinus Lubis	m/d sp. Jalan Haryono MT s/dsp. Jalan Sei Kera
45	Jalan Manggala	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Kalianda
46	Jalan Merapi	m/d sp. Jalan Merbabu s/d sp. Jalan Haryono MT
47	Jalan Merbabu	m/d sp. Jalan m. h. Thamrin s/d sp. Jalan Dr. Sutomo
48	Jalan Natal	m/d sp. Jalan Bogor s/d sp. Jalan Kota Nopan I
49	Jalan Pakantan	m/d sp. Jalan Pandu Baru s/d sp. Jalan Kota Nopan I
50	Jalan Pandan	m/d sp. Jalan Haryono MT s/d sp. Jalan Riau
51	Jalan Pandu baru	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Mahkamah
52	Jalan Plaju	m/d sp. Jalan Sutrisno s/d sp. Jalan Yoserizal
53	Jalan Palangkaraya Baru	m/d sp. Jalan Cirebon s/d sp. Jalan Palangkaraya
54	Jalan Palangkaraya	m/d sp. Jalan Pandu s/d sp. Jalan Haryono MT
55	Jalan Porsea	m/d sp. Jalan Bandung s/d sp. Jalan Bogor
56	Jalan Riau Baru	m/d sp. Jalan Riau s/d sp. Jalan Veteran
57	Jalan Riau	m/d sp. Jalan Irian Barat s/d sp. Jalan Dr. Sutomo
58	Jalan Rupert	m/d sp. Jalan Bawean s/d sp. Jalan Riau
59	Jalan Salak	m/d sp. Jalan Merbabu s/d sp. Jalan Dr. Sutomo
60	Jalan Samarinda	m/d sp. Jalan Dr.Sutomo s/d sp. Jalan Amuntai
61	Jalan Sambas	m/d sp. Jalan Amuntai s/d sp. Jalan

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
		Banjarmasin
62	Jalan Sambu	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Irian Barat
63	Jalan Selamat	m/d sp. Jalan Merbabu s/d sp. Jalan Salak
64	Jalan Seiat Panjang	m/d sp. Jalan Bogor s/d sp. Jalan Pandu
65	Jalan Semarang	m/d sp. Jalan Pandu s/d sp. Jalan Haryono MT
66	Jalan Seram Baru	m/d sp. Jalan Seram s/d sp. Jalan Seram
67	Jalan Sumba	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Martinus
68	Jalan Sun Yat Sen	m/d sp. Jalan Sutrisno s/d sp. Jalan Kaliandra
69	Jalan Surabaya Baru	m/d sp. Jalan Cirebon s/d sp. Jalan Surabaya
70	Jalan Surabaya	m/d sp. Jalan Haryono MT s/d sp. Jalan Pandu
71	Jalan Surakarta	m/d sp. Jalan Haryono MT s/d sp. Jalan Pandu
72	Jalan Sutomo Baru	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Martinus Lubis
73	Jalan Talaud	m/d sp. Jalan Mentawai s/d sp. Jalan Merbabu
74	Jalan Indragiri	m/d sp. Jalan Kalianda s/d sp. Jalan Asia
75	Jalan Jambi	m/d sp. Jalan Dr. Wahidin s/d sp. Jalan Tan Malaka
76	Jalan Kampten Jumhana	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Sutrisno (07.00-18.00)
77	Jalan Jurung	m/d sp. Jalan Dr. Wahidin s/d sp. Titi Parit Busuk
78	Jalan Kalianda	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Kuantan
79	Jalan Kalimantan	m/d sp. Jalan Dr. Wahidin s/d sp. Jalan HOS Cokroaminoto
80	Jalan Kelinci	m/d sp. Jalan HOS Cokroaminoto s/d sp. Jalan Beruang
81	Jalan Kelud	m/d sp. Jalan Merbabu s/d sp. Jalan Salak
82	Jalan Wilis	m/d sp. Jalan Merbabu s/d sp. Jalan Salak
83	Jalan Yoserizal	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Demak
84	Jalan Tan Malaka	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Mabar
85	Jalan Maluku	m/d sp. Jalan Tan Malaka s/d Gerbang Perguruan Sutomo
86	Jalan Nusantara	m/d sp. Jalan Puri s/d sp. Jalan Amaliun
87	Jalan Padang Sidempuan	m/d sp. Jalan Surabaya s/d sp. Jalan Cirebon
88	Jalan Panjang	m/d sp. Jalan Tilak s/d sp. Jalan Sutrisno
89	Jalan Parapat	m/d sp. Jalan Tapanuli s/d sp. Jalan Madong Lubis
90	Jalan Pekanbaru	m/d sp. Jalan KS. Tubun s/d sp. Jalan Langsa
91	Jalan Pelangi	m/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Katamso s/d sp. Jalan Sisingamangaraja
92	Jalan Perbaungan	m/d sp. Jalan Bakaran Batu s/d sp. Ujung Jalan
93	Jalan Pulau Berhala	m/d sp. Jalan Mentawai s/d sp. Jalan Pulau

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
		Nias
94	Jalan Puri	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Ismailiyah
95	Jalan Samosir	m/d sp. Jalan KS. Tubun s/d sp. Jalan HOS Cokroaminoto
96	Jalan Seram	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Martinus Lubis
97	Jalan Siak	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin s/d sp. Jalan Sei Kera
98	Jalan Siantar	m/d sp. Jalan Tapanuli s/d sp. Jalan Madong Lubis
99	Jalan Gunung Sibayak	m/d sp. Jalan Haryono MT s/d sp. Jalan Kawi
100	Jalan Sindoro	m/d sp. Jalan Gunung Merapi s/d sp. Jalan Dr. FL. Tobing
101	Jalan Singapore	m/d sp. Jalan Asia s/d sp. Jalan Mahatma Ghandi
102	Jalan Singosari	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Bakaran Batu
103	Jalan Sipiso-piso	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Mahkamah
104	Jalan Suasa	m/d sp. Jalan Mahatma Ghandi s/d sp. Jalan Timah
105	Jalan Sulawesi	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin s/d sp. Jalan Sei Kera
106	Jalan Tamiang	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin s/d sp. Jalan Sei Kera
107	Jalan Tapanuli	m/d sp. Jalan Dr. Wahidin s/d sp. Jalan Tan Malaka
108	Jalan Tembaga	m/d sp. Jalan Mahatma Ghandi s/d Ujung Jalan Tembaga
109	Jalan Thamrin Baru	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Singapore
110	Jalan Tilak	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Bakaran Batu
111	Jalan Veteran Baru/Dalam	m/d sp. Jalan Veteran s/d sp. Jalan Sutomo Baru
112	Jalan Veteran	m/d sp. Jalan Irian Barat s/d sp. Jalan M. h. Thamrin
113	Jalan Dr Wahidin Baru	m/d sp. Jalan Dr. Wahidin s/d sp. Jalan Harimau
114	Jalan Dr. Wahidin	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Akasara
115	Jalan Waja	m/d sp. Jalan Mahatma Ghandi s/d sp. Jalan Pasar Timah
116	Jalan KS. Tubun	m/d sp. Jalan Madong Lubis s/d sp. Jalan Sampali
KECAMATAN MEDAN TIMUR		
1	Jalan Akasia	m/d sp. Jalan Selamat s/d sp. Jalan Karantina
2	Jalan Alfalah	m/d sp. Jalan Ampera s/d sp. Jalan Mustafa
3	Jalan Bambu I	m/d sp. Jalan Gaharu s/d sp. Jalan Durian

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
4	Jalan Bambu II	m/d sp. Jalan Yos Sudarso s/d sp. Jalan H. M. Said
5	Jalan Bukit Barisan	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d sp. Jalan Muchtar Basri
6	Jalan Bukit Barisan II	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d sp. Jalan Prajurit
7	Jalan Cahaya	m/d sp. Jalan Mozasa s/d sp. Jalan Durian
8	Jalan Durian	m/d sp. Jalan Perintis Kemerdekaan s/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, S. H
9	Jalan Gaharu	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, S. H. s/d sp. Jalan Karantina
10	Jalan Prof. H. M. Yamin, S. H. I	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin s/d sp. Jalan Sena
11	Jalan Prof. H. M. Yamin, S. H. II	m/d sp. Jalan H. M. Said s/d sp. Prof. H. M. Yamin, S. H.
12	Jalan H. M. Said (dh. Jalan Durian)	m/d sp. Jalan Perintis Kemerdekaan s/d sp. Jalan Pelita IV
13	Jalan Jati	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d Titi Parit Busuk
14	Jalan Jemadi	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d sp. Rel Kereta Api
15	Jalan Karantina	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudorso s/d sp. Jalan Prajurit
16	Jalan Kemuning	m/d sp. Jalan Dr. Sutomo s/d sp. Jalan Durian
17	Jalan M. Arif Lubis (dh. Jalan Adi Negoro)	m/d sp. Jalan Mozasa s/d sp. Jalan H. M. Said
18	Jalan Madio Santoso	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d Ujung Jalan
19	Jalan Madura	m/d sp. Jalan Jawa s.d sp. Jalan Timor
20	Jalan Mahameru	m/d sp. Jalan Mustafa s/d Jalan Gunung Krakatau
21	Jalan Mahoni	m/d sp. Jalan Gaharu s/d Jalan Mozasa
22	Jalan Metal II	m/d sp. Jalan Perbatasan s/d Ujung Jalan Metal II
23	Jalan Metal	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d sp. Jalan Pemuda Karya
24	Jalan Mozasa	m/d sp. Jalan Perintis Kemerdekaan s/d sp. Jalan Karantina
25	Jalan Muchtar Basri	m/d sp. Jalan Kartika s/d sp. Jalan Alfalah
26	Jalan Mustafa	m/d sp. Jalan Bilal s/d sp. Jalan Mahameru
27	Jalan Pasar III	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d Titik Parit Busuk
28	Jalan Pelita	m/d sp. Jalan K.L. Yos Sudarso s/d sp. Jalan Brgadir Jenderal Bejo
29	Jalan Pelita IV	m/d sp. Jalan H.M Said s/d sp. Jalan Rakyat
30	Jalan Pelita II	m/d sp. Jalan Rakyat s/d sp. Jalan H.M Said
31	Jalan Pendidikan	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d sp. Jalan Rakyat
32	Jalan Perwira	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d sp, Kantor Lurah

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
33	Jalan Perwira II	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d sp. Jalan pemuda Karya
34	Jalan Rakyat	m/d sp. Jalan Pasar III s/d sp. Jalan Pelita I
35	Jalan Selamat	m/d sp. Jalan Mozasa s/d sp. Jalan H.M Said (dh. Jalan Durian)
36	Jalan Sena	m/d sp. Jalan Durian s/d sp. Jalan H.M Thamrin
37	Jalan Sidodame	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d Ujung Jalan
38	Jalan Sisomulyo	m/d sp. Jalan Bilal s/d sp. Jalan Sidorukun
39	Jalan Sidorukun	m/d sp. Jalan Gunung Krakatau s/d Titi Parit Busuk
40	Jalan Timor	m/d sp. Jalan Veteran s/d sp. Jalan Gaharu
41	Jalan Timor Baru	m/d sp. Jalan Timor s/d sp. Jalan Timor Baru II
42	Jalan Timor Baru II	m/d sp. Jalan Timor Baru s/d sp. Jalan Veteran
43	Jalan Timor Baru I	m/d sp. Jalan Timor s/d sp. Jalan Timor
KECAMATAN MEDAN PETISAH		
1	Jalan Airlangga	m/d sp. Jalan Candi Biara s/d Ujung Jalan Airlangga
2	Jalan Baja Raya	m/d sp. Jalan Dazam Raya s/d sp. Jalan Dewi Ruci
3	Jalan Pasar Petisah Medan	Basement Pasar Petisah Medan
4	Jalan Biduk	m/d sp. Jalan Orion s/d Jalan sp. Jalan Iskandar Muda
5	Jalan Bima Sakti	m/d sp. Jalan Iskandar Muda s/d sp. Jalan Dazam Raya
6	Jalan Burjamhal	m/d sp. Jalan Dazam Raya s/d sp. Jalan Iskandar Muda
7	Jalan Dagan	m/d sp. Jalan Razak s/d sp. Jalan Merbabu
8	Jalan Dazam Raya	m/d sp. Jalan Orion s/d sp. Jalan Perpustakaan
9	Jalan Dewa Ruci	m/d sp. Jalan Burjamhal s/d sp. Jalan Mengkara
10	Jalan Dharma Wanita	m/d sp. Jalan Rotan s/d sp. Jalan Nibung Utama
11	Jalan Ibus Raya	m/d sp. Jalan Nibung Utama s/d sp. Jalan Perpustakaan
12	Jalan Karo	m/d sp. Jalan Glugur s/d sp. Jalan S. Parman
13	Jalan Kebun Bunga	m/d sp. Jalan S. Parman s/d Jembatan Sei Babura
14	Jalan Kirana	m/d sp. Jalan Kirana Raya s/d sp. Jalan Nibung Raya
15	Jalan Kirana Raya	m/d sp. Jalan Biduk s/d sp. Jalan Nibung II
16	Komplek Jalan Taman Kirana	m/d sp. Jalan Taman Kirana s/d Ujung jalan Kirana
17	Jalan Kota Baru II	m/d sp. Jalan Merbabu Baru s/d sp. Jalan Rajak Baru
18	Jalan Kota Baru III	m/d sp. Jalan Merbabu Baru s/d sp. Jalan Rajak Baru

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
19	Jalan Kruwing	m/d sp. Jalan Razak s/d sp. Jalan Merbabu
20	Jalan Kapten Maulana Lubis	m/d Jembatan sei Babura s/d Depan Wisma Benteng
21	Jalan Mayang	m/d sp. Jalan Adam malik s/d sp. Jalan Waringin
22	Jalan Mengkara	m/d sp. Jalan Burjamhal s/d sp. Jalan Perpustakaan
23	Jalan Meranti	m/d sp. Jalan Sekip s/d sp. Jalan Pasundan
24	Jalan Merbabu Baru	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Kota Baru II
25	Jalan Merbau	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Skip
26	Jalan Mojopahit	m/d sp. Jalan S. Parman s/d sp. Jalan P. Nyak Makam
27	Jalan Mojopahit Terusan	m/d sp. Jalan Mojopahit s/d sp. Jalan Rotan
28	Jalan Nibung Baru	m/d sp. Jalan Nibung Raya s/d sp. Jalan Merbabu Baru
29	Jalan Nibung Utama	m/d sp. Jalan Nibung raya s/d sp. Jalan Merbabu Baru
30	Jalan Nibung II	m/d sp. Jalan Iskandar Muda s/d sp. Jalan Nibung Raya
31	Jalan Orion	m/d sp. Jalan Iskandar Muda s/d sp. Jalan Nibung Raya
32	Jalan Pepaya	m/d sp. Jalan Guru Patimpus s/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto
33	Jalan Jawarhal Nehru (dh. jalan Kalingga)	m/d sp. Jalan Taruma s/d Jalan Candi Biara
34	Jalan Rambung	m/d sp. Jalan Adam Malik s/d sp. Jalan Waringin
35	Jalan Razak Baru	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Rotan
36	Jalan Rotan	m/d sp. Jalan Dharma Wanita s/d sp. Jalan Glugur
37	Jalan Rotan Baru	m/d sp. Jalan Ibus Raya s/d sp. Jalan Tualang Bawang
38	Jalan Sei Deli	m/d sp. Jalan Guru Patimpus s/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto
39	Jalan Sei Sikambing	m/d sp. Jalan Adam Malik s/d sp. Jalan Sekip
40	Jalan Skip	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Rel Kereta Api
41	Jalan Skip Baru	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Rotan
42	Jalan Teuku Umar	m/d sp. Jalan Kejaksaan s/d Ujung Jalan Teuku Umar
43	Jalan Taruma	m/d sp. Jalan K.H Zainul Arifin s/d sp. Jalan Kebun Bunga
44	Jalan Tumapel	m/d sp. Jalan Candi Borobudur s/d Ujung Jalan Tumapel
45	Jalan warga (Lurusan Jalan Iskandar Muda)	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Meranti

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
46	Jalan Waringin	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Mayang
KECAMATAN MEDAN AREA		
1	Jalan Akik	m/d sp. Jalan Berlian s/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim
2	Jalan Alumunium	m/d sp. Jalan Timah Putih s/d sp. Jalan Asia Raya
3	Jalan Asia Baru	m/d sp. Jalan M. H Thamrin Baru s/d sp. Jalan Singapore
4	Jalan Asia Permai	m/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim s/d sp. Jalan Asia Raya
5	Jalan Asia Raya	m/d sp. Jalan Ruko Nomor 18 Blok K s/d Ruko Nomor 24 Blok I
6	Jalan Berlian	m/d sp. Jalan Sutrisno s/d sp. Jalan Sabaruddin
7	Jalan Besi	m/d sp. Jalan Pasar Timah s/d sp. Jalan Sutrisno
8	Jalan Gang D	m/d sp. Jalan Masjid s/d sp. Jalan Walter Mangonsidi
9	Jalan Gang II (Jalan Asia Raya)	m/d sp. Jalan kapten Jumhana s/d sp. Jalan Timah Putih
10	Jalan Gang III (Jalan Asia Raya)	m/d sp. Jalan Kapten Jumhana s/d sp. Jalan Abdul Rahman
11	Jalan Gang IV (Jalan Asia Indah)	m/d sp. Jalan Jumhana s/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim
12	Jalan Emas	m/d sp. Jalan Sutrisno s/d sp. Jalan Pasar Timah
13	Jalan Gedung Arca	m/d sp. Jalan Halat s/d sp. Jalan Stadion
14	Jalan Halat	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Ismailiyah
15	Jalan Ismailiyah	m/d sp. Jalan Sutrisno s/d sp. Jalan Megawati/Jalan Halat
16	Jalan Laksana	m/d sp. Jalan Halat s/d sp. Jalan Sutrisno
17	Jalan Medan Area	m/d sp. Jalan Puri s/d sp. Jalan Megawati
18	Jalan Megawati	m/d sp. Jalan Ismailiyah s/d sp. Jalan Abdul rahman Hakim
19	Jalan Pelajar	m/d sp. Jalan Stadion Teladan s/d Ujung Jalan Pelajar
20	Jalan Pencak	m/d sp. Jalan Gedung Arca s/d sp. Jalan Senam
21	Jalan Stadion Teladan	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Keliling Stadion Teladan
22	Jalan Langkat	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. s/d sp. Jalan Sei Kera
23	Jalan Langsa	m/d sp. Tapanuli s/d sp. Jalan Madong Lubis
24	Jalan Lombok	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. s/d sp. Jalan Sei Kera
25	Jalan Madong Lubis	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. s/d sp. Jalan KS Tubun
KECAMATAN MEDAN MAIMUN		

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
1	Jalan Bahagia	m/d sp. Jalan H. Ir. Juanda Baru s/d sp. Jalan Warna
2	Jalan Cakrawati	m/d sp. Jalan Mangkubumi s/d sp. Jalan Pemuda
3	Jalan Brigadir Jenderal Katamso	m/d sp. Jalan Ir. H. Juanda s/d sp. Jalan Sakti Lubis
4	Jalan Brigadir Jenderal Katamso Dalam	m/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Katamso s/d Ujung (Komplek Mega Prima)
5	Jalan Kolonel Sugiono	m/d sp. Jalan Mangkubumi s/d sp. Jalan Palang Merah
6	Jalan Kotanopan I	m/d sp. Jalan Cirebon s/d sp. Jalan Palangkaraya
7	Jalan kotanopan II	m/d sp. Jalan Cirebon s/d sp. Jalan Palangkaraya
8	Jalan Mahkamah	m/d sp. Jalan Mesjid Raya s/d sp. Jalan Pandu
9	Jalan Mangkubumi	m/d sp. Jalan Palang Merah s/d sp. Jalan Pemuda
10	Jalan Pemuda Baru I	m/d sp. Jalan Pegadaian s/d sp. Jalan Pemuda
11	Jalan Pemuda Baru II	m/d sp. Jalan Pegadaian s/d sp. Jalan Pemuda
12	Jalan Pemuda Baru III	m/d sp. Jalan Pegadaian s/d sp. Jalan Pemuda
13	Jalan Pemuda Baru	m/d sp. Jalan Pegadaian s/d sp. Jalan Pemuda
14	Jalan Pengadaian	m/d sp. Jalan Pandu s/d sp. Jalan Palang Merah
15	Jalan Suka Mulia	m/d sp. Jalan Palang Merah s/d Ujung Jalan Sukamulia
16	Jalan Warna	m/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Katamso s/d sp. Jalan Bahagia
17	Jalan Warni	m/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Katamso s/d sp. Jalan Bahagia
18	Jalan Mesjid Raya	m/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Katamso s/d sp. Jalan Sisingamangaraja
KECAMATAN MEDAN POLONIA		
1	Jalan Adi Sucipto/Padang Golf	m/d sp. Jalan Padang s/d sp. Jalan Sukamulia
2	Jalan Ahmad Dahlan	m/d sp. Jalan Imam Bonjol s/d sp. Jalan Slamet Riyadi
3	Jalan Dr. Cipto	m/d sp. Jalan Wolter Mangonsidi s/d sp. Jalan Urip
4	Jalan Cut Meutia	m/d sp. Jalan Pangeran Diponegoro s/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol
5	Jalan Cut Nyak Dien	m/d sp. Jalan Pangeran Diponegoro s/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol
6	Jalan H. Misbah	m/d sp. Jalan Kantil s/d sp. Jalan A. Rivai
7	Jalan Hang Tuah	m/d sp. Jalan Teuku Cik Di Tiro s/d sp. Jalan Pangeran Diponegoro
8	Jalan Perhubungan	m/d sp. Jalan Adi Sucipto s/d Ujung Jalan
9	Jalan Tengku Daud	m/d sp. Jalan Pangeran Diponegoro s/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol
10	Jalan Ternak	m/d sp. Jalan Polonia s/d sp. Jalan Starban
11	Jalan Uskup Agung	m/d sp. Jalan Hang Tuah s/d sp. Jalan Jenderal Sudirman

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
12	Jalan Teuku Cik Di Tiro	m/d sp. Jalan Jenderal Sudirman s/d sp. Jalan K. H. Zainul Arifin
13	Jalan Wolter Mangonsidi	m/d sp. Jalan Polonia s/d Titi
14	Jalan Muara Takus	m/d sp. Jalan Cik Di Tiro s/d sp. Jalan Teuku Umar
15	Jalan Multatuli	m/d sp. Jalan Letnan Jenderal Suprpto s.d sp. Jalan Samanhudi
16	Jalan Smanhudi	m/d sp. Jalan Jenderal Sudirman s/d sp. Jalan Ir. H. Juanda
17	Jalan Jenggala	m/d sp. Jalan Cik Di Tiro s/d sp. Jalan Teuku Umar
18	Jalan Karya Pembangunan	m/d sp. Jalan Wolter Mangonsidi s/d sp. Jalan Mesjid
19	Jalan Kartini	m/d sp. Jalan Cik Di Tiro s/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol
20	Jalan Karya Dharma	m/d sp. Jalan Karya Pembangunan s/d Ujung Jalan
21	Jalan Kediri	m/d sp. Jalan Cik Di Tiro s/d sp. Jalan Teuku Umar
22	Jalan Listrik	m/d sp. Jalan Palang Merah s/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol
23	Jalan Mahayana	m/d sp. Jalan K. H. Zainul Arifin s/d sp. Jalan Kalingga
24	Jalan Mesjid	m/d sp. Jalan Karya Pembangunan s/d sp. Gang B
25	Jalan Pagaruyung	m/d sp. Jalan Muara Takus s/d sp. Jalan Kalingga
26	Perumahan Taman Multi Indah Lestari (Jalan Multatuli)	Perumahan Taman Multi Indah Lestari (Jalan Multatuli)
27	Jalan Pattimura	m/d sp. Jalan Jenderal Sudirman s/d sp. Jalan Wolter Mangonsidi
28	Jalan Polonia	m/d sp. Jalan Wolter Mangonsidi s/d Ujung Jalan Polonia
29	Jalan S. Parman	m/d sp. Jalan Gajah Mada s/d sp. Jalan Jenderal Sudirman
30	Jalan Slamet Riyadi	m/d sp. Jalan Tuanku Imam Bonjol s/d sp. Jalan Ir. H. Juanda
31	Jalan Suryo	m/d sp. Jalan Ir. H. Juanda s/d Jalan Linggar Jati
32	Jalan Urip	m/d sp. Jalan Walikota s/d Ujung Jalan Urip
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL		
1	Jalan Abadi	m/d sp. Jalan Setia Budi s/d sp. Jalan Industri
2	Jalan Abdul Hakim	m/d sp. Jalan Pembangunan s/d sp. Jalan Setia Budi
3	Jalan Amal	m/d sp. Jalan Gagak Hitam s/d sp. Jalan TB. Simatupang
4	Jalan Asoka	m/d sp. Jalan Ring Road s/d sp. Jalan Bunga raya s/d Ujung Jalan
5	Jalan Flamboyan	m/d sp. PEMDA s/d Titi
6	Jalan Jenderal Gatot Subroto	m/d sp. Jalan Kapten Muslim s/d Titi

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
		sungai/batas kota
7	Jalan Industri	m/d sp. Jalan Perjuangan s/d sp. Jalan Sunggal
8	Jalan PDAM/ Jalan Bunga Raya	m/d Kantor Polisi s/d sp. Jalan Flamboyan
9	Jalan Pasar I	m/d sp. Jalan Ring Road s/d sp. Jalan Setia Budi
10	Jalan Perjuangan	m/d sp. Jalan Setia Budi s/d sp. Jalan Industri
11	Jalan Rajawali	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Sunggal
12	Jalan TB Simatupang (Dh. Jalan Pinang Baris)	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d batas Kelurahan Sukuwati
13	Jalan Sunggal	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan PDAM
14	Jalan Setia Budi	m/d sp. Jalan Dr. Mansyur s/d sp. Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting
15	Jalan Kasuari	m/d sp. Jalan Jarot Soeprapto s/d sp. Jalan Rajawali
16	Jalan Merak	m/d sp. Jalan Rajawali s/d sp. Jalan Gagak Hitam
KECAMATAN MEDAN SELAYANG		
1	Jalan Bunga Terompet	m/d sp. Jalan Ngumban Surbakti s/d sp. Jalan Sembada IX Koserna
2	Jalan Bunga Turi I	m/d sp. Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting s/d Ujung Jalan Bunga Turi I
3	Jalan Pintu Air IV	m/d sp. Jalan Pintu Air s/d Ujung
4	Jalan Jalan Flamboyan	m/d Depan Ruko Nomor 41-A s/d Wartel Mulia Basa
5	Jalan Sempakata	m/d sp. Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting s/d sp. Jalan Ngumban Surbakti
6	Jalan Sembada	m/d sp. Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting s/d sp. Jalan Bunga Kenanga
7	Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting	m/d Pajak Sore Padang Bulan s/d Batas Kota Medan
8	Jalan Luku	m/d sp. Jalan Jenderal A.H. Nasution s/d sp. Jalan Pintu Air IV
9	Jalan Melati	m/d sp. Jalan Ngumban Surbakti s/d sp. Jalan Setia Budi
KECAMATAN MEDAN HELVETIA		
1	Jalan Abdul Manaf Lubis (dh.Gaperta)	m/d sp. Jalan Danau Singkarak s/d sp. Jalan Cempaka
2	Jalan Asrama	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d Rel Kereta Api
3	Jalan Ayahanda	m/d sp. Jalan Gatot Subroto s/d Rel Kereta Api
4	Jalan Bom/Jalan Matahari Raya	m/d sp. Jalan Kapten Muslim s/d sp. Jalan Beringin Jaya
5	Jalan Cangkir	m/d sp. Jalan Abdul Hamid s/d sp. Jalan Parit Busuk (khusus hari Jum'at dan Sabtu)
6	Jalan Danau Jempang	m/d sp. Jalan Danau Singkarak s/d sp. Jalan Karya Rakyat

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
7	Jalan Danau Marsabut	m/d sp. Jalan Danau Singkarak s/d Rel Kereta Api
8	Jalan Danau Singkarak	m/d Titi Gaperta s/d sp. Jalan Gereja
9	Jalan Gelas	m/d sp. Jalan Jalan Abdul Hamid s/d sp. Jalan Punak
10	Jalan Karya Dame	m/d sp. Jalan Karya s/d sp. Jalan Kapten Muslim
11	Jalan Kemuning	m/d sp. Jalan Kemuning Raya s/d sp. Jalan Melur
12	Jalan Pasundan	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Punak
13	Jalan Pribadi	m/d sp. Jalan Kelambir Lima s/d Ujung Jalan Pribadi
14	Jalan Kelambir Lima	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Lembaga Perasyarakatan
15	Jalan Setia/Jalan Cempaka	m/d sp. Jalan Gaperta Ujung s/d sp. Jalan Kelambir Lima
16	Jalan Seroja	m/d sp. Jalan Nusa Indah s/d Kantor PERUM Gas
17	Jalan Nusa Indah Raya	m/d sp. Jalan Cempaka s/d sp. Jalan Pilisium
18	Jalan Pertama	m/d sp. Jalan Kapten Muslin s/d sp. Gang Harapan
19	Jalan Sampul	m/d sp. Jalan Ayahanda s/d Ujung Jalan Sampul
20	Jalan Sumarsono	m/d sp. Jalan Rel Kereta Api s/d sp. Jalan Restu
21	Jalan Kapten Muslim	m/d sp. Jalan Gaperta s/d sp. Jalan Kapten Sumarsono
22	Jalan Pabrik Tenun	m/d sp. Jalan Ayahanda s/d sp. Jalan Skip
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN		
1	Jalan Asahan	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin , SH. s/d sp. Jalan Sei Kera
2	Jalan Bambu Runcing	m/d sp. Jalan Dr. Wahidin s/d sp. Jalan Pahlawan
3	Jalan Bandar Baru	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Pancur Batu
4	Jalan Bangau	m/d sp. Jalan Madong Lubis s/d sp. Jalan Mabar
5	Jalan Belitung	m/d sp. Jalan H. M. Yamin, SH. s/d sp. Jalan Sei Kera
6	Jalan Berastagi	m/d sp. Jalan GB.Yosua s/d sp. Jalan Madong Lubis
7	Jalan Dorowati	m/d sp. Jalan Kemerdekaan s/d sp. Jalan Ngalengka
8	Jalan GB. Yosua	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. s/d sp. Jalan Malaka
9	Jalan Enggang	m/d sp. Jalan Penyabungan s/d sp. Jalan Mabar
10	Jalan Negara	m/d sp. Jalan Dr. Wahidin s/d sp. Jalan Satria
11	Jalan Ngalengko	m/d sp. Jalan Perintis Kemerdekaan s/d

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
		Kantor Salaputda
12	Jalan Pahlawan	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. s/d sp. Keris
13	Jalan Palembang	m/d sp. Jalan Tan Malaka s/d sp. Jalan Sei Kera
14	Jalan Pancur Batu	m/d sp. Jalan Prof H. M. Yamin, SH. s/d sp. Jalan GB. Yosua
15	Jalan Pendawa	m/d sp. Jalan Dorowati s/d sp. Jalan Ngallengko
16	Jalan Perjuangan	m/d sp. Jalan Williem Iskandar s/d sp. Jalan Purwo
17	Jalan Purwo	m/d sp. Jalan Perintis Kemerdekaan s/d sp. Jalan Pelita I
18	Jalan Rencong	m/d sp. Jalan Bambu Runcing s/d Ujung jalan
19	Jalan Sentosa Baru	m/d sp. Jalan Prof. M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Gorilla
20	Jalan Sei Kera	m/d sp. Jalan M. H. Thamrin s/d sp. Jalan Madong Lubis
21	Jalan Sibolga	m/d sp. Jalan Tan Malaka s/d sp. Jalan Sei Kera
22	Jalan Tempuling/ Jalan Medan Utara	m/d sp. Jalan Bhayangkari s/d sp. Jalan Makmur
KECAMATAN MEDAN BARU		
1	Jalan Abdullah Lubis	m/d sp. Jalan K. H. Wahid Hasyim s/d sp. Jalan S. Parman
2	Jalan Babura Baru	m/d sp. Jalan Kapten Pattimura s/d ujung jalan
3	Jalan Babura Lama	m/d sp. Jalan Kapten Pattimura s/d ujung jalan
4	Jalan Darat	m/d sp. Jalan Abdullah Lubis s/d sp. Jalan Hayam Wuruk
5	Jalan Darussalam	m/d sp. Jalan Jenderal Gatot Subroto s/d sp. Jalan Sei Belutu
6	Jalan D. I. Panjaitan	m/d sp. Jalan K. H. Wahid Hasyim s/d sp. Jalan Sei Bamban
7	Jalan Kangkung	m/d sp. Jalan Abdullah Lubis s/d sp. Jalan Hayam Wuruk
8	Jalan Peringgan	m/d sp. Jalan Sultan Iskan Muda s/d sp. Jalan D. I. Panjaitan
9	Jalan Sei Bekala	m/d sp. Jalan D. I. Panjaitan s.d sp. Jalan Sei Batang Serangan
10	Jalan Sei Batang Hari	m/d sp. Jalan Sunggal s/d sp. Jalan Darussalam
11	Jalan Sei Belutu	m/d sp. Jalan Darussalam s/d sp. Jalan Setia Budi
12	Jalan Sei Kerio	m/d sp. Jalan D. I. Panjaitan s/d sp. Jalan Sultan Iskandar Muda
13	Jalan Sei Mencirim	m/d sp. Jalan Sultan Iskandar Muda s/d sp. Jalan Darussalam
14	Jalan Sei Petani	m/d sp. Jalan K. H. Wahid Hasyim s/d sp.

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
		Jalan Sultan Iskandar Muda
15	Jalan Sei Putih Baru	m/d sp. Jalan Darussalam s/d sp. Jalan Sei Putih
16	Jalan Sei Putih	m/d sp. Jalan Abdullah Lubis s/d sp. Jalan Sei Belutu
17	Jalan Sei Seraya	m/d sp. Jalan Darussalam s/d sp. Jalan Setia Budi
18	Jalan Sriwajaya	m/d sp. Jalan Gajah Mada s/d sp. Jalan P. Nyak Makan
19	Jalan Syailendra	m/d sp. Jalan Sultan Iskandar Muda s/d sp. Jalan Sriwajaya
20	Jalan K. H. Wahid Hasyim	m/d sp. Jalan Jend. Gatot Subroto s/d sp. Jalan Letjend Jamin Ginting
21	Jalan Mataram	m/d sp. Jalan Gajah Mada s/d sp. Jalan T. D. Pardede
22	Jalan Tomat	m/d sp. Jalan Mojopahit s/d sp. Jalan Sriwijaya
KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN		
1	Jalan Bungalau	m/d sp. Jalan Letjend. Jamin Gtg s/d sp. Jalan Sisingamangaraja
2	Jalan Jahe Raya	m/d sp. Jalan Cengkeh Raya s/d sp. Jalan Vanii Raya
3	Jalan Kapiten Purba	m/d sp. Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting s/d sp. Titi
4	Jalan Karet Raya	m/d Titi s/d sp. Jalan Tembakau Raya
5	Jalan Sakura Raya	m/d sp. Jalan Flamboyan Raya s/d Komplek Alamanda
6	Jalan Tembakau Raya	m/d sp. Jalan Karet Raya s/d sp. Jalan Vanii Raya
KECAMATAN MEDAN JOHOR		
1	Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution (dh. Jalan Karya Jasa)	m/d sp. Jalan Letjend. Jamin Ginting s/d sp. Jalan Sisingamangaraja
2	Jalan Eka Resmi	m/d sp. Jalan Karya Wisata s/d sp. Jalan Karya Jaya
3	Jalan Karya Jasa	m/d sp. Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution s/d sp. Jalan Eka Warni
4	Jalan Karya Kasih	m/d sp. Jalan Karya Jaya s/d sp. Jalan Karya Wisata
5	Jalan Karya Wisata	m/d sp. Jalan Karya Jaya s/d Pasar V
6	Jalan Brigadir Jenderal Hamid	m/d sp. Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution s/d Batas Kota Medan
KECAMATAN MEDAN AMPLAS		
1	Jalan Bajak II	m/d sp. Jalan Tritura s/d Batas Kota Medan
2	Jalan Dame	m/d sp. Jalan Ssisingamangaraja s/d sp. Jalan Manullang
3	Jalan Menteng Raya	m/d sp. Jalan Abdul Rahman s/d sp. Jalan Menteng VII
4	Jalan Menteng Raya VII	m/d sp. Jalan Menteng Raya s/d Batas Terminal Amplas
5	Jalan M. G. Manurung	m/d sp. Jalan Turi s/d sp. Jalan Dame

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
6	Jalan Sembada	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Manullang
7	Jalan Sempurna	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Bahagia By Pass
8	Jalan Senayan	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Stadion Teladan
9	Jalan Sisingamangaraja	m/d sp. Jalan Ir. H. Juanda s/d Batas Kota Medan
10	Jalan Turi	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Kanan Bahagia By Pass
11	Jalan M. Nawih Harahap	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d Gang Ikhlas
12	Jalan Kemiri	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d Depan GKPI
13	Jalan Panglima Denai	m/d sp. Jalan Menteng Raya s/d sp. Pasar V
14	Jalan Rawa	m/d sp. Jalan Panglima Denai s/d Ujung Jalan Rawa
15	Jalan Sakti Lubis	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Katamso
16	Jalan Talawi	m/d sp. Jalan Sisingamangaraja s/d sp. Jalan Stadion Teladan
17	Jalan STM	m/d sp. Jalan Sakti Lubis s/d sp. Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG		
1	Jalan Ahmad Thahir (dh. Jalan Mandala By Pass)	m/d sp. Jalan Letnan Dua Sujono s/d Jalan Denai
2	Jalan Area	m/d sp. Jalan Mandala By Pass s/d sp. Jalan Aksara
3	Jalan Baru	m/d sp. Jalan Padang s/d sp. Jalan Banten
4	Jalan Bhayangkara	m/d sp. Jalan Williem Iskandar s/s Titi
5	Jalan Bulu Perindu	m/d sp. Jalan Pukat s/d sp. Jalan Ampera
6	Jalan Padang	m/d sp. Jalan Letnan Dua Sujono s/d Rel Kerta Api
7	Jalan Sejati	m/d sp. Jalan Mandala By Pass s/d sp. Jalan Aksara
8	Jalan Selam	m/d sp. Jalan Pukat s/d sp. Jalan Abdul Rahman Hakim
9	Jalan Horas	m/d sp. Jalan Mandala s/d sp. Jalan Aksara
10	Jalan Letnan Duo Sujono	m/d sp. Jalan Aksara s/d Titi Sewa
11	Jalan Mesjid	m/d sp. Jalan Mandala By Pass s/d sp. Jalan Aksara
12	Jalan Pertiwi	m/Kd sp. Jalan Sosro s/d sp. Jalan Banten
13	Jalan Perguruan	m/d sp. Jalan Mandala By Pass s/d sp. Jalan Aksara
14	Jalan Pukat Harimau	m/d sp. Jalan Pukat s/d Rel Kereta Api
15	Jalan Pukat IV	m/d sp. Jalan Aksara s/d sp. Jalan Mandala By Pass
16	Jalan Rahayu	m/d sp. Jalan Pukat s/d sp. Jalan Tirtosari
17	Jalan Tirtosari	m/d sp. Jalan Inti Sari s/d sp. Jalan Banten
18	Jalan Tuasan	m/d sp. Jalan Williem Iskandar s/d Titi Parit

NO	NAMA JALAN	BATAS JALAN
		Busuk
19	Jalan Williem Iskandar	m/d sp. Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. s/d sp. Jalan Brigadir Jenderal Bejo
KECAMATAN MEDAN BELAWAN		
1	Jalan Bangka	m/d sp. Jalan Selebes s/d Ujung Jalan Bangka
2	Jalan Bunga	m/d sp. Jalan Selebes s/d Ujung Jalan Bangka
3	Jalan Sumatera	m/d sp. Jalan Serma Hanafiah s/d sp. Jalan Deli
4	Jalan Pasar	m/d sp. Jalan Selebes s/d Ujung Jalan Pasar
5	Jalan Pulau Sicanang	m/d sp. Jalan Kaptan R. Sulian s/d Titi PLN
6	Jalan Langkat	m/d sp. Jalan Sumatea s/d sp. Jalan Veteran
7	Jalan Indrapura	m/d sp. Jalan Deli s/d sp. Jalan Karo
8	Jalan Jawa	m/d sp. Jalan Sumatera s/d Ujung Jalan Jawa
9	Jalan R. Sulian	m/d Titi Sei Deli s/d sp Jalan Serma Hanafiah
10	Jalan Pelabuhan Raya Belawan	m/d sp. Jalan Pelabuhan Raya I s/d sp. Jalan Bagan
11	Jalan Serdang	m/d sp. Jalan Sumatera s/d sp. Jalan Veteran
12	Jalan Serma Hanafiah	m/d sp. Jalan Sumatera s/d Ujung jalan
13	Jalan Veteran	m/d sp. Jalan Simalungun s/d sp. Jalan Asahan
14	Jalan Riau	m/d sp. Jalan Selebes s/d Ujung Jalan Riau
KECAMATAN MEDAN LABUHAN		
1	Jalan Tangkul Seruai	m/d Titi Toll s/d Ujung Tangkal Seruai
2	Jalan Jaring Raya	m/d sp. Jalan Tuar Raya s/d sp. Jalan Tangguk Raya
3	Jalan Pancing (Martubung)	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Jalan Rawe
4	Jalan Rawe	m/d sp. Titi Parit s/d Ujung Jalan Rawr (Tangkahan)
5	Jalan Tangguk Raya	m/d sp. Jalan Rawe s/d sp. Jalan Tangguk
KECAMATAN MEDAN DELI		
1	Jalan Aluminium Raya	m/d sp. Jalan Pematang Pasir s/d sp. Jalan Perbatasan
2	Jalan Platini II	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d Rel Kereta Api
3	Jalan Kawasan Industri Medan	Dalam Kawasan Industri Medan
4	Jalan Kayu Putih	m/d sp. Jalan Pulau Pasir s/d Ujung (Toll)
5	Jalan Pematang Pasir	m/d sp. Jalan Kayu Putih s/d sp. Jalan Aluminium
6	Jalan Rumah Potong Hewan	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Jalan Tojai
7	Jalan Manggaan III	m/d sp. Jalan Rumah Potong Hewan s/d Titi
8	Jalan Tanjung Mulia	m/d sp. Jalan K. L. Yos Sudarso s/d sp. Jalan Pematang Pasir

Sumber: Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perparkiran

Lampiran 3:

Dokumentasi Penelitian



(Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan)



(wawancara Pada Dinas Perhubungan, 12 April 2023)



(Kartu Tanda Juru Parkir, 17 April 2023)





(Wawancara Juru parkir, 17 April dan 09 Mei 2023)






(Wawancara Masyarakat pengguna parkir tepi jalan umum, 17 April dan 09 Mei 2023)

Lampiran 4:

Surat Pengantar Riset Fakultas

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7369012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 543/FIS.2/01.10/IV/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

4 April 2023

Yth,
Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA)
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Indah Tri Madyati Hrp
N P M : 198520073
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan**, dengan judul Skripsi "*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Ettiati Juliana Hasibuan, M.Si

Lampiran 5:

Surat Pengantar Riset Brida (Badan Riset Inovasi Daerah)

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A.H Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20233
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
NOMOR : 000.9/BRIDA/0296

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nomor: 543/FTS.2/01.10/IV/2023. Tanggal: 04 April 2023. Hal: Pengambilan Data/Riset.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Kepada :

Nama : Indah Tri Madyati Hrp.
NIM : 198520073.
Jurusan : Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Perhubungan, Kota Medan.
Judul : "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)".
Lamanya : 1 (satu) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 April 2023

Dilandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,
MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (FvB)
NIP. 196805091989021001

Tembusan :
1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan, Kota Medan.
3. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Arsip.

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BRIDE
(SK) TK. No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 "Tetapanan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran 6:

Surat Selesai Riset Dinas Perhubungan

